

**PERANAN FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN GUNA UPAYA
MENINGKATKAN REPEMENT RATE PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI
KELURAHAN BULAKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN
SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Sosiologi**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

commit to user

PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pembimbing Skripsi,



(Dra. Rahesli Humsona, M.Si)

NIP. 196411291992032002

LEMBAR PENGESAHAN

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada

Hari : Jumat
Tanggal : 29 April 2011

Panitia penguji skripsi :

Dr. Mahendra Wijaya, Ms
19600723 198702 1001

Ketua



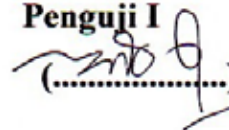
Siti Zunariyah, S. Sos, M.Si
19770719 200801 2016

Sekretaris



Dra. Rahesli Humsona, M.Si
19641129 199203 2002

Penguji I



Mengetahui :

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Dekan



(Drs. H. Supriyadi, SN, SU)
NIP. 19530128 198103 1 001

MOTTO

" Tidak ada keberhasilan tanpa usaha, kesabaran, dan doa. Semua terangkai bagai segitiga emas yang tak akan terputus" .

(miss. viar)

“ Perjuangan hidup adalah ketika bagaimana anda mengalami terjatuh dalam kegagalan dan berusaha bangkit kembali dalam hal yang lebih baik“

(Hanna)

“ Kegagalan bukanlah kegagalan, kecuali anda tidak belajar darinya “

(Henry Ford)

****** Hidup adalah bagaimana kita menghargainya******

Era Et Labora

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

Pencipta alam semesta raya dan pemberi segala anugrah Tuhan Yesus Kristus

Pemberi kasih, cinta, ketulusan, pengertian dan pengorbanan.....

Insan terindah dengan segenap rasa cinta dan sayang tulus untukku

- ❖ Kedua orangtuaku *Bapak Sunarto* dan *ibu Sukarti* yang telah membesarkanku dalam cinta kasih dan doa serta materi yang dicurahkan penuh demi keberlangsungan skripsi ini.
- ❖ Suami tercinta *Cahya Kartika Rosindraprpta, S.H* terimakasih atas dukungan doa dan kesetiaanmu dalam mendampingiku.
- ❖ Mamah tercinta *ibu Sri Murtini Rosanto* atas dukungan dan doa serta kesabaranmu.
- ❖ Untuk ketiga peri kecilku my brother *Ugro, Nakulo, dan Sadewo* tawa dan certamu adalah semangat dalam kesuntukkanku.
- ❖ Untuk ketiga sahabatku *Mas Damar, Mas Adi dan Mbak Dini* terimakasih atas persahabatannya dan kerjasama selama ini.
- ❖ Almamater *sosiologi nonreguler 2005, 2006, 2007* terimakasih buat kenangan indah selama ini.
- ❖ Dosen pembimbingku yang tak jenuh memberikan ilmu serta kesabarannya *ibu Dra.Rahesli Humsona, M.Si.*
- ❖ Keluarga besar PNPM-MP KORKOT Kab.Sukoharjo
- ❖ Para Fasilitator PNPM-MP terkhusus *mbak Dini, bunda Siwi, mbak Ari, mas Nur*

Terimakasih yang tak terhingga atas semua doa yang tulus dan pengorbanan, bantuan, dorongan semangat dan nasehat baik serta cinta kasih kalian semua.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan karunia dan rejekiNya kepadaku sehingga skripsi yang berjudul **“PERANAN FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN GUNA UPAYA MENINGKATKAN REPEMENT RATE PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN BULAKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO”**. (Studi Deskriptif kualitatif peranan fasilitator dalam pemberdayaan guna meningkatkan repement rate pada PNPM-MP di kelurahan bulakan kecamatan sukoharjo kabupaten sukoharjo) ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini disusun dan dipersiapkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Kepada semua pihak dari berbagai kalangan yang selama telah membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai wujud penghargaan atas segala bantuan dan dukungan, kepada :

1. Drs.H. Supriyadi, SN,SU. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra.LV.Ratna Devi.S,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

3. Dra.Rahesli Humsona, M.Si yang penuh perhatian, ketelitian, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Sosiologi FISIPOL UNS yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama ini.
5. Seluruh staf perpustakaan dan bagian pengajaran FISIPOL UNS yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Suyatno,S.Sos. selaku Kepala Kelurahan Bulakan beserta staf yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Drs.Sunardi selaku Ketua RW IV dan Ibu Dra.Udarini selaku Ketua PKK RW IV beserta Keluarga dan masyarakat RW IV Kelurahan Bulakan, yang telah membantu dalam proses pencarian data dalam penelitian ini.
8. Darmaji selaku Koordinator BKM beserta anggota, UPL, UPK, UPS dan Sekretaris, serta masyarakat Kelurahan Bulakan yang telah membantu dalam pengumpulan data, sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Sutarto, SP. Selaku Korkot PNPM-MP Kab. Sukoharjo beserta Assisten dan staf serta Tim fasilitator pendamping yang sangat membantu selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua informan dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melengkapi data penelitian ini.
11. Teman-temanku “yang telah bersamaku, mengingatkanku, memotivasi dan menemaniku selama ini.

12. Terima kasih Adhie dan Damar dan mbak Dini atas persahabatannya yang indah selama ini, semoga kita bisa sukses bersama.

13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Ada pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri dan tiada harimau tanpa belang sehingga membuat penulis sangat menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa sehingga penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan penelitian selanjutnya hingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi sesama.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Tinjauan Pustaka	22
G. Kerangka Berpikir.....	30
H. Definisi Konseptual.....	41
I. Metode Penelitian.....	41
BAB II DESKRIPSI LOKASI	48
A. Deskripsi Lokasi Kelurahan Bulakan.....	48
1. Lokasi Penelitian	48
2. Batas Wilayah	48

commit to user

3. Luas Wilayah	49
B. Keadaan Penduduk Bulakan.....	50
1. Jumlah Penduduk	50
2. Mata Pencarian Penduduk	50
3. Tingkat Pendidikan Penduduk	52
C. Sarana Dan Prasarana.....	54
D. Deskripsi Lokasi RW IV	61
E. Deskripsi Program PNPM-MP	67
F. Deskripsi Program Penelitian.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Penelitian	74
1. Profil Responden.....	75
2. Profil Informan.....	78
B. Pembahasan	82
C. Peran Fasilitator dalam Kegiatan Ekonomi Bergulir Melalui Proses Pelaksanaan.....	88
1. Pembuatan proposal	88
2. Penerimaan dana	90
3. Membayar angsuran	92
D. Proses Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM).....	97
1. Proses Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok	97
2. Proses Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM.....	104

E. Proses Pemberian Bantuan	106
F. Peranan Fasilitator (PNPM-MP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Ekonomi Bergulir Di Desa Bulakan	110
1. Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pemberdayaan	111
2. Pemberian Bantuan	117
3. Kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pemberdayaan	119
G. Analisis Data	125
BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
1. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)	143
2. Pemberian Bantuan	144
B. Implikasi	145
1. Implikasi Empiris	145
2. Implikasi Teoritis	145
3. Metode	146
C. Saran	148
1. Bagi Internal Fasilitator (PNPM-MP)	148
2. Bagi Masyarakat dan kelompok ekonomi bergulir	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Pengambilan Sampel Berdasarkan jenis kelamin	49
Tabel. 2 Sarana lingkungan di Kelurahan Bulakan.....	49
Tabel. 3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010	51
Tabel. 4 Komposisi Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Kelurahan Bulakan Bulan Juni 2010	53
Tabel. 5 Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kelurahan Bulakan.....	54
Tabel. 6 Sarana Peribadatan Kelurahan Bulakan	55
Tabel. 7 Sarana Prasarana Ekonomi Kelurahan Bulakan.....	56
Tabel. 8 Sarana Kesehatan Kelurahan Bulakan.....	59
Tabel. 9 Penerima Bantuan PNPM-MP Kelurahan Bulakan	61
Tabel 10 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di RW IV.....	62
Tabel 11 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan RW IV.....	63
Tabel 12 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan RW IV	64
Tabel 13 Data Penerima Manfaat Kegiatan Ekonomi Bergulir KSM Mesra di RW IV.....	66
Tabel Repepent Rate Kelurahan Bulakan (dalam %)	96

DAFTAR MATRIK

Matrik 1 Karakteristik Responden.....	77
Matrik 2 Karakteristik Informan Yang Tergabung Dalam Kelompok Ekonomi bergulir pada kelompok KSM Mesra.....	81
Matrik 3 Peran fasilitator Dalam Pelaksanaan Kegiatan ekonomi bergulir Pada PNPM-MP di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kriteria jenis kelamin	93
Matrik 4 Pendapat Informan Tentang Materi yang Dibahas dalam Pertemuan Pengurus	98
Matrik 5 Pendapat Informan Tentang Pertemuan Pengurus masing- masing KSM.....	100
Matrik 6 Pendapat Informan Tentang Kegiatan yang Dibahas dalam Pertemuan Kelompok	102
Matrik 7 Pendapat Informan Tentang Sasaran yang Dikunjungi	104
Matrik 8 Pendapat Informan Tentang Hasil Diskusi.....	105
Matrik 9 Pendapat Informan Tentang Stimulant Modal.....	107
Matrik 10 Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pendampingan Pertemuan Pengurus.....	112
Matrik 11 Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pendampingan Pertemuan Kelompok.....	114

Matrik 12 Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM.....	115
Matrik 13 Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Stimulant Modal	118
Matrik 14 Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM- MP) dalam Pendampingan Pertemuan Pengurus.....	120
Matrik15 Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM- MP) dalam Pendampingan Pertemuan Kelompok.....	121
Matrik 16 Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM- MP) dalam Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM.....	122
Matrik 17 Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM- MP) dalam Stimulant Modal	124

ABSTRAK

Novia Rahayu Prawulandari. D3206026, “PERANAN FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN GUNA UPAYA MENINGKATKAN REPEMENT RATE PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN BULAKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO”.

Penelitian mengenai peranan fasilitator dalam pemberdayaan guna upaya meningkatkan repement rate pada PNPM-MP di kelurahan bulakan kecamatan sukoharjo kabupaten sukoharjo, ini adalah bagaimana peranan dan strategi fasilitator dalam meningkatkan repement rate khususnya kegiatan ekonomi bergulir dan sejauh mana keterlibatan mereka yang diterapkan itu dirasa berhasil didalam pelaksanaan program. *Peranan fasilitator* adalah suatu tindakan secara sadar dengan adanya keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat yang secara sadar untuk bekerjasama melakukan usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan khususnya kegiatan ekonomi bergulir.

Penulis dalam hal ini secara konseptual penelitian ini didasarkan atas teori pemberdayaan. Yang secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misal ditindas oleh struktur social yang tidak adil)

Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada realita yang muncul dan bertujuan untuk menggambarkan data dengan uraian atau penjelasan yang berasal dari wawancara atau catatan di lapangan. Dan menggunakan analisis data yaitu model interaktif yang terdapat tiga komponen pokok : reduksi data, sajian data, dan kesimpulan. Untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Lokasi dalam penelitian ini adalah RW IV terfokus pada RT 01 dan RT 02 kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa peranan fasilitator dalam pemberdayaan guna upaya meningkatkan repement rate pada PNPM-MP di kelurahan bulakan kecamatan sukoharjo kabupaten sukoharjo khususnya kegiatan ekonomi bergulir menunjukkan adanya tindakan sosial serta peranan fasilitator dalam mendukung dan bekerjasama melewati proses : perencanaan yaitu memberikan ide/gagasan dan menentukan pengambilan keputusan; pelaksanaan yaitu dengan memberikan bantuan waktu, tenaga, dan pikiran; pemanfaatan yaitu dengan membangun dan menggunakan hasil yaitu berupa pinjaman bergulir untuk masyarakat dikelurahan Bulakan kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

ABSTRACT

Novia Rahayu Prawulandari. D3206026, "FACILITATOR ROLE IN EFFORT TO EMPOWERMENT REPEMENT RATE INCREASE IN NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM SELF IN BULAKAN VILLAGE SUKOHARJO DISTRICT SUKOHARJO REGENCY".

Research on the role of facilitator in the empowerment to efforts to improve rapement rate in PNPM-MP in the Bulakan village Sukoharjo district Sukoharjo Regency, this is how the role and strategy in improving rapement fasilitattor particular rate of economic activity revolving and extent of their involvement was felt to be applied successfully in the implementation program. The role of the facilitator is an act consciously in the presence of mental and emotional involvement and physical integrity of persons or groups of people who consciously to cooperate to make efforts to achieve the goals by way of planning, implementing, using and accompanied by responsibilities, and evaluation of programs and activities carried out in particular activities the economy rolling.

The author in this study conceptually based on empowerment theory. Which are conceptually or empowerment (empowerment) is derived from the word 'power' (power or empowerment). Therefore, the main idea of empowerment in touch with the concept of power is often associated with our ability to make others do what we want. Empowerment refers to the ability of people, especially vulnerable groups and weak that they have the power or ability. The main objective is to strengthen the power of community empowerment, particularly vulnerable groups who have a disability, either because of internal conditions (such as their own perception), as well as external conditions (eg, oppressed by an unjust social structure).

This research is a descriptive qualitative research that emphasizes the reality that emerged and aimed to describe the data with a description or explanation derived from interviews or notes in the field. And using an interactive model of data analysis is that there are three main components: data reduction, data, and conclusions. To test the validity of the data using triangulation of sources. The location of this research is focused on the RW IV RT 01 and RT 02 Bulakan village Sukoharjo district Sukoharjo Regency.

From the analysis of data obtained the conclusion that the role of facilitator in the empowerment to efforts to improve repement rate in PNPM-MP in the village bulakan Sukoharjo Sukoharjo district in particular economic activities revolving show the existence of social action and the role of facilitator in the support and work through the process: planning is to give an idea / ideas and determine the decision-making; implementation by providing assistance time, energy, and mind; utilization by developing and using the results in the form of revolving loans for people in Bulakan village Sukoharjo district Sukoharjo Regency.

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar umat manusia hingga kini, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kemiskinan dapat terjadi karena pendapatan yang rendah, dan pendapatan yang rendah diakibatkan oleh berbagai macam sebab, misalnya sempitnya lahan pertanian garapan petani di desa, gaji rendah bagi buruh kasar di kota, pengangguran terbuka ataupun terselubung.

Seperti halnya bangsa Indonesia yang masih terdapat kasus kemiskinan yang menurut suparlan (1995 : xi) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang biasa disingkat dengan istilah BPPN tahun 1993 menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Masalah yang menglobal ini hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus saja

memberikan informasi masih banyaknya jumlah penduduk miskin, menurut Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS perkembangan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2008 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 34,96 juta orang (15,42 persen) dibandingkan sampai dengan bulan Maret 2009 berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008 sampai dengan bulan Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada periode maret 2008 sampai dengan maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di pedesaan mencapai 0,58 persen. Terjadi penurunan pada data statistik BPS.¹

Dalam hal ini dapat di kaji terlebih dahulu sebab terjadinya kemiskinan. Menurut Kuncoro² yang mengutip *Sharp*, penyebab kemiskinan adalah :

1. Secara makro kemiskinan minimal karena adanya *ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya* yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah .

¹ (Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009; dalam google net <http://www.bps.go.id> hari jumat 2 april 2010 jam 11.45).

² Kuncoro (2000 : 107)

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam *kualitas sumber daya manusia*. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau faktor keturunan.
3. Kemiskinan *muncul akibat perbedaan akses dalam modal*.

Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.

Sebenarnya pembangunan nasional yang dilaksanakan di negara Indonesia selama beberapa PELITA, yang berlangsung sejak awal tahun 1969 telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diwujudkan telah pula menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin. Namun demikian, masalah kemiskinan masih perlu dituntaskan mengingat jumlah penduduk yang masih termasuk dalam kelompok penduduk miskin masih cukup besar, apalagi sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 telah membuat

bangsa Indonesia merasa kecil hati dengan hasil pembangunan yang telah dicapai³.

Dalam orientasi pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan, cenderung memandang masyarakat hanya sebagai obyek bantuan dalam bentuk berbagai pelayanan dan pemberian fasilitas sosial. Hal ini justru memperbesar ketergantungan (dependensi) antara masyarakat dan proyek pembangunan atau antara masyarakat dengan pemerintah, dan pada hakekatnya dapat merendahkan martabat manusia. Karenanya, sifatnya menjadi *disempowering*, masyarakat tidak mampu untuk mengaktualisasikan potensi yang ada dan tak bisa mandiri.

Untuk itu sudah saatnya paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang menempatkan kapital finansial dan kapital fisik sebagai modal utama pembangunan, diganti dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat dan lebih mengutamakan perhatian pada masyarakat ekonomi lemah. Pembangunan dengan cara ini hanya akan dapat diwujudkan kalau pembangunan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan ini telah mengeluarkan beberapa strategi pembangunan sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, antara lain: *pertama*, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres, karena proyek ini akan mendatangkan pentransferan sumber-sumber dana dari pusat ke

³ (diperoleh melalui google net <http://pengentasan.kemiskinan.com>, hari jumat 2 april 2010 jam 13.00)

daerah, seperti, Inpres Desa Tertinggal (IDT). *Kedua*, mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial. Pada perkembangannya, untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), ataupun Program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS)⁴.

Dalam hal perkembangannya Pemerintah Indonesia bekerjasama melalui DPU atau Departemen Pekerjaan Umum melalui program penanggulangan kemiskinan pada tahun 1999 mendirikan sebuah program pengentasan kemiskinan yang pada periodenya yang pertama disebut P2KP yang kemudian diperbarui dengan tujuan yang sama dengan nama lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan atau biasa disingkat dengan PNPM-MP.

Sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Program ini dinilai sangat strategis karena pada awalnya adalah menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representativ dan dipercaya tersebut (secara generic disebut Badan Keswadayaan Masyarakat

⁴(Dwiyanto, Agus. Dkk.2007. *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada)

atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (social capital) kehidupan masyarakat (buku pedomanPNPM-MP : 10-13)⁵ .

Dengan demikian, BKM selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan hidup mereka, sekaligus menjadi penggerak bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan.

Tiap-tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan diwilayahnya secara mandiri. Atas fasilitas pemerintah dan prakarsa masyarakat, serta peran fasilitator sehingga BKM–BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

1. Pengertian PNPM-MP

- a. PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program–program penanggulangan kemiskinan

⁵ (dikutip berdasar buku umum pedoman PNPM-MP, halaman 10 sampai dengan 13)

dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan serta sistem mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- b. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang telah dicapai.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh dari berbagai unsur masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering

terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representativ, dan akuntabel.
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor atau keberpihakan pada kemiskinan).
- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya.
- 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat .

Sumber dana PNPM-MP berasal dari bantuan hibah Bank Dunia (World Bank). Untuk besarnya pengalokasian dana di tiap wilayah

disesuaikan dengan kondisi tiap wilayah tersebut seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah KK miskin. .

Dari prinsip dasar PNPM-MP tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa proyek ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal sehingga menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pengambilan keputusan.

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Dana bantuan ini berupa hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung, sepengetahuan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di tingkat kecamatan yang ditunjuk, dan sepengetahuan warga masyarakat dalam hal ini adalah BKM.

Penerima bantuan PNPM-MP ini adalah perseorangan dan keluarga miskin yang berada di satuan wilayah kelurahan atau desa perkotaan yang tersebar diseluruh perkotaan Indonesia, dan yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak. Desa perkotaan yang dimaksud disini adalah wilayah yang berbentuk desa namun secara administratif letak dan posisinya dekat dengan kota sehingga dapat menjadi wilayah sasaran dari PNPM-MP. Jenis bantuan dalam PNPM-MP ini mengakar pada konsep *tridaya* , yaitu:

1. Bantuan pengembangan *ekonomi*, yang digunakan dalam bentuk kegiatan:

commit to user

- a. Pemberian pinjaman dana bergulir dengan bunga ringan atau 0% sebagai modal usaha produktif⁶.
 - b. Bantuan hibah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial (pengembangan sumber daya manusia).
2. Bantuan pengembangan sosial, yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti :
- a. Pemberian alat bantu sekolah, seperti alat tulis kepada siswa yang tergolong masih merupakan KK miskin .
 - b. Bantuan dana kepada para lansia (lanjut usia) yang masuk pada data miskin diwilayahnya.
 - c. Bantuan untuk rehab rumah KK miskin.
 - d. Santunan dana sehat.
3. Bantuan pengembangan lingkungan, yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar lingkungan yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat seperti: pembuatan bak dan gerobak sampah, betonisasi jalan, selokanisasi, pembuatan talud dan lain-lain.

Dana bantuan untuk pengembangan sosial kemanusiaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembangkan, namun masyarakat harus menunjukkan kesanggupan dan tanggungjawabnya untuk dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Sedangkan bantuan dana yang digunakan untuk modal usaha produktif merupakan pinjaman bergulir yang disalurkan

⁶ (berdasar pembekalan yang disampaikan ASKOT CD atau asisten kota wil.Sukoharjo adalah bapak Dade.S sebagai pembicara pada tahun 2009 dalam pembekalan kegiatan magang bertempat dirumah bapak Anom Suroto pukul 19.00)

kepada KSM-KSM. Pengelolaan dana bantuan pinjaman dana bergulir ini dilakukan oleh salah satu unit pengelola BKM, yaitu unit pengelola keuangan (UPK).

Pemberian pinjaman dana bergulir sebagai modal usaha produktif bagi masyarakat ini merupakan stimulant agar penduduk miskin diperkotaan mempunyai keinginan untuk maju dengan membuat suatu jenis usaha atau untuk mengembangkan usaha yang telah ada, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Status pemanfaatan dana pinjaman bergulir ini merupakan sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UPK.

Pada program diatas juga terdapat pada salah satu desa yang merupakan dari sasaran PNPM-MP yang masuk pada tahun 2005 desa tersebut adalah desa bulakan yang secara geografis terletak di kabupaten Sukoharjo, lebih kurang 4 Km disebelah barat kota sukoharjo. Desa bulakan berbatasan langsung dengan desa Serenan kabupaten kelaten yang terpisah oleh sungai bengawan solo yang juga merupakan sentra meubel kayu antik. Disebelah utara berbatasan dengan desa Dukuh. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan desa Kriwen. Menurut data Monografi Bulan Februari 2007-2010 disebutkan bahwa jumlah penduduk 6962 orang dengan jumlah laki-laki 3473, perempuan 3489, KK 1533, dan KK miskin 647⁷. Kelurahan bulakan merupakan salah satu kelurahan yang merupakan pelaksanaan PNPM-MP dipandang representatif mewakili daerah lain yang juga melaksanakan PNPM-

⁷ Dikutip dari buku PJM pronangkis desa bulakan hal: 6

MP. Didaerah ini telah berjalan program PNPM-MP selama dua kali dalam periode tertentu. Kelurahan Bulakan memiliki semangat besar dalam upaya peningkatan Repement Rate (Tingkat pengembalian pada kegiatan ekonomi bergulir) pada kegiatan ekonomi. Dalam semangat yang besar yang dilakukan oleh masyarakat bulakan tidak lepas dari peran serta fasilitator, kerjasama yang seimbang mampu membuat tingkat pengembalian berjalan lancar jika dibandingkan pada periode lalu, hal ini dapat dilihat pada Kegiatan Magang Mahasiswa UNS atau yang biasa disingkat dengan KMMS pada tahun 2009 bulan agustus–november pada PNPM-MP diwilayah sukoharjo, bagaimana peranan fasilitator dalam upaya meningkatkan repement rate pada PNPM-MP didesa bulakan yang kemudian menjadikan penulis mengangkat tema tersebut sebagai bahan skripsi guna memenuhi syarat dalam kelulusan strata1 atau S1.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitaian ini adalah : Bagaimana peranan fasilitator PNPM-MP dalam pemberdayaan guna meningkatkan Repement Rate di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui bagaimana peranan fasilitator dalam pemberdayaan guna upaya meningkatkan Repement Rate pada PNPM-MP di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

commit to user

2. Mengetahui kemudahan-kemudahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP dalam bantuan pengembangan ekonomi di kelurahan Bulakan.
3. Mengetahui kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP dalam bantuan pengembangan ekonomi di kelurahan Bulakan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini secara Praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengenai pemberdayaan masyarakat.
 - b. Dapat sebagai bahan evaluasi dan masukan atas pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM-MP.
 - c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis

2. Manfaat Akademis

Sebagai memenuhi syarat Kelulusan setara 1 (S1) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Batasan Konsep

a. Peranan

Paul B. Horton dan Chester I. Huan (Abdul, 1987 : 100) mengartikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu status. Mempelajari sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek yaitu : pertama, kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peranan, kedua memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapainya seseorang akan mengadakan interaksi dengan yang lain (baik dengan individu maupun dengan kelompok) yang dalam interaksi ini akan terjadi adanya tindakan sebagai suatu rangsangan dan tanggapan sebagai suatu respon.

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai status. Sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Artinya status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah penerapan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Menurut kamus Sosiologi devinisi peranan sebagai berikut :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan Kewajiban

commit to user

- c. Perilaku aktual dan pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Secara konseptual status dan peran ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat. Wujud dari status dan peranan itu adalah adanya tugas-tugas yang dijalankan oleh seseorang berkenaan dengan posisi dan fungsinya dalam masyarakat. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan status seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat.

Didalam peranan tersebut terdapat dua macam harapan, adapun harapan tersebut adalah :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan denganya dalam menjalankan peranya atau kewajiban-kewajibanya.⁸

Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya seorang atau kelompok menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan tersebut mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

⁸ (Soekanto,2003: 254).

meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto 2003: 244)

Menurut Hendro Puspito (1989 : 244), peranan adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peranan sebagai konsep yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Wujud dari status dan peran itu adalah adanya tugas-tugas yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam masyarakat.

“Maka dapat disimpulkan bahwa *peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu . Konsep peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan fungsi fasilitator dengan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang harus dilaksanakan dalam sesuatu kegiatan pemberdayaan* “.

b. Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok yang didampingi lebih maju (Nn, 2007 : 1). Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok

commit to user

yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Akibatnya fasilitator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : berani, disiplin, bersedia membantu, tanggung jawab, sabar (telaten), komunikatif, mencairkan suasana, mau mendengarkan orang lain, empati (bias merasakan) dan tanggap situasi (peka) serta dapat memutuskan sesuatu dengan baik. Oleh karena ini maka dapat disebutkan tugas yang diemban fasilitator sangat berat dan butuh pengorbanan, adapun tugas fasilitator dalam pendampingan sebuah kelompok adalah :

1. Menyampaikan informasi
2. Menjadi juru bicara
3. Nara Sumber (membawa info dari luar)
4. Membantu memecahkan masalah

Fasilitator adalah sekumpulan orang yang melakukan suatu perubahan dengan menjalankan fungsi utamanya sebagai :

1. Fasilitasi : melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan suatu program
2. Mediasi : melakukan mediasi antara beberapa pihak yang ada dalam program
3. Advokasi : melakukan advokasi & penyadaran kritis dalam masyarakat⁹.

Fasilitator adalah personal-personal individu yang tergabung dalam sebuah management atau tim, terorganisir dan terlatih untuk melakukan

⁹ (Tupoksi Fasilitator, Pra Tugas Fasilitator DMC-JRF Jogyakarta 8 maret 2010)

perubahan kesadaran kritis dan pola pikir serta menggerakkan proses pemberdayaan didalam suatu wilayah masyarakat untuk mencapai suatu target dalam proses pemberdayaan.¹⁰

Dalam hal ini Barker (1987) fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional¹¹.

“Dari pengertian fasilitator diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan : *Fasilitator adalah sekumpulan orang yang terorganisir dan terlatih untuk melakukan perubahan kesadaran kritis dan pola pikir serta menggerakkan proses pemberdayaan didalam suatu wilayah masyarakat untuk mencapai suatu target dalam proses pemberdayaan*” .

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, Suharto Edi, Ph.D., (2005): *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* dalam halaman 58). Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial¹².

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984). Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi

¹⁰ (Pelatihan Dasar Pra Tugas Fasilitator PNPM –MP, kantor PNPM-MP sukoharjo 2010)

¹¹ Suharto Edi, Ph.D., (2005): *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*)

¹² (Swift dan Levin, 1987 Suharto Edi, Ph.D., (2005): *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* halaman 58)

pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya¹³. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

1. memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
2. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses kegiatan dalam program pembangunan guna mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan hal yang berkaitan dengan diri dengan lingkungannya (Nn 2007 : 2). Gagasan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan daerah termasuk juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskan pada kekuatan masyarakat setempat¹⁴.

¹³ (Parsons, etal., 1994 dalam buku Suharto Edi, Ph.D., (2005): *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* halaman 59)

¹⁴ (Wicaksono, 2006 : 27)

Menurut Drajat Tri Kartono¹⁵, terdapat hal-hal mendasar dan penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, adapun hal tersebut adalah :

1. Pengembangan organisasi/ kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan masyarakat.
2. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/ organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat.
3. Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan kegiatan.
4. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.
5. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dapat dipecahkan dengan baik.
6. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatkannya kesejahteraan hidup serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat, dimana terjadi sebuah proses pertumbuhan segenap potensi kemandirian dan kekuatan masyarakat berkembang menjadi kekuatan nyata yang ditandai oleh perkembangan kemampuan konsisten, berpartisipasi

¹⁵ (dikutip dari Arbi, 2002 : 53-55)

aktif dalam didalam politik dan pembangunan, mengorganisasikan diri secara aktif dan menentukan substansi serta arah kebijakan politik pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat akan mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Karena pemberdayaan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan transfer ilmu kepada obyek baik masyarakat atau lembaga. Sesuai dengan pemikiran dari Mendes dalam jurnalnya, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga unsur :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
2. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat
3. Pemberdayaan yang juga berarti melindungi

Pemberdayaan memungkinkan proses dilakukan secara partisipatif dan berkembang sinergi antara pemerintah dengan berbagai pranata dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui perpektif pemberdayaan merupakan suatu paradigma dimana masyarakat sebagai individu bukanlah sebagai objek dalam pembangunan melainkan mampu berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhinya¹⁶.

¹⁶ (dikutip googel net dalam <http://: pemberdayaan masyarakat rubrik kemiskinan januari 2010>).

Payne mendefinisikan pemberdayaan adalah membantu masyarakat memperoleh kekuatan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi dampak dari hambatan yang sifatnya pribadi atau sosial dalam melakukan tindakan dengan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan dan dengan mentransfer kekuatan dari lingkungan¹⁷.

“Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa *pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat*. Atau dengan kata lain adalah bagaimana *menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri*”.

F. Tinjauan Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan lain dalam penelitian ini adalah penelitian dengan judul : Peran LSM InterAksi dalam Memberdayakan Kaum Difabel Korban Gempa di Klaten, oleh Muhamad Imdad pada tahun 2007. Penelitian Imdad merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang Peran LSM InterAksi dalam Memberdayakan Kaum Difabel Korban Gempa di Klaten. Dengan

¹⁷ (Payne dalam adi,2002:162)

analisis menggunakan model komparatif dengan jalan membandingkan indikator keberdayaan dengan hasil tindakan pemberdayaan LSM InterAksi yang diterima oleh difabel .

Penelitian Imdad dilatarbelakangi oleh banyaknya korban gempa bumi di kabupaten klaten yang cacat dan akhirnya menjadi kurang berdaya. Teknik pengumpulan data dalam skripsi Imdad berperan sebagai *human instrument* yang turun kelapangan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Pengumpulan data dilakukan baik interaktif ataupun noninteraktif. Pengambilan sample menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa sample yang dipilih dapat mewakili apa yang dimaksud dalam tujuan penelitian. Sample yang diambil sebanyak 17 informan dengan rincian sebagai berikut : manager program sebanyak 3 orang (DFP,CBR dan PSS), community organizer local berjumlah 2 orang, dan sebanyak 11 orang difabel yang digunakan sebagai sampel.

Tujuan dari penelitian Imdad adalah untuk menemukan peran yang dimiliki oleh LSM InterAksi dalam pemberdayaan terhadap difabel korban gempa bumi di klaten. Peran dalam penelitian Imdad lebih menunjuk kepada tindakan individu atau kelompok pada posisi tertentu. Peran yang dimiliki oleh LSM InterAksi yaitu peran pendampingan dan peran penguatan potensi diri difabel.

Dari hasil temuan dilapangan peran pendampingan yang dilakukan LSM LnterAksi adalah melalui needs assessment dalam hal kebutuhan

commit to user

pokok difabel, aksesibilitas rumah akses dan MCK akses. Dalam peran hal penguatan potensi diri dilakukan dengan peningkatan potensi diri kaum difabel melalui berbagi macam pelatihan keterampilan¹⁸.

b. Jurnal Internasional

1. PERANAN FASILITATOR DALAM PROSES PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Studi kasus : Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang

Hasil Penelitian : Ninies Ardhiani (Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP-UI)

Jenis : Jurnal internasional

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan, sebab dari kemiskinan itu akan timbul permasalahan-permasalahan lain yang tentunya bisa berdampak negatif jika kemiskinan tersebut tidak diatasi. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan, pendekatan yang perlu digunakan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Proses ini tidak timbul secara otomatis melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar, yaitu fasilitator yang mengerti mengenai program masyarakat dan masyarakat yang menjadi sasarannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai peranan fasilitator di Lembaga Masyarakat Mandiri (MM) dalam proses

¹⁸ Skripsi oleh Muhamad Imdad Peran LSM InterAksi dalam Memberdayakan Kaum Difabel Korban Gempa di Klaten, pada tahun 2007

pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga kabupaten Tangerang.

Dalam proses pemberdayaan terdapat tahapan yang harus dilalui dan fasilitator turut mengambil peran dalam setiap tahapan tersebut. Teori yang dipakai adalah teori Ife yang menjelaskan peranan fasilitator, educator, representasional, dan peran-peran teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam (Indeep interviewing) dan observasi, sedangkan pemaparan yang dijabarkan dalam penelitian dilakukan secara deskriptif.

Proses pemberdayaan di Muara terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati diantaranya : tahap persiapan, sosialisasi, pembentukan kelompok, pembiayaan dan program-program sosial, penguatan kelembagaan, monitoring, evaluasi serta exit strategy. Dalam tahapan tersebut tidak terlepas dari adanya kendala baik dari lembaga, fasilitator dan masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan disetiap tahapan peran yang dijalankan fasilitator adalah, pada tahap sosialisasi peran yang dijalankan adalah fasilitator dan edukator. Pada tahap pembiayaan program sosial dan pembinaan peranan yang dijalankan adalah fasilitator, representational dan edukator; pada tahap kelembagaan peranan yang dijalankan adalah fasliterator; pada tahap monitoring dan evaluasi peran yang dijalankan adalah fasilitator, edukator, representational.

Berdasarkan hal tersebut maka peranan fasilitator harus ditingkatkan, walaupun dalam menjalankan perannya diperlukan inisiatif sendiri dari fasilitator untuk mengambil suatu tindakan¹⁹.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, yang paling utama adalah sebagai fasilitator, yang lebih menitikberatkan kepada bagaimana menstimulasi dan mendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Memfasilitasi lembaga dalam menyampaikan misi dan program lembaga kepada masyarakat pada tahap sosialisasi. Begitu juga sebaliknya memfasilitasi masyarakat mendapatkan pembiayaan dan bantuan-bantuan lain dari program pemberdayaan. Dalam menjalankan fasilitator menggunakan berbagai macam teknik dalam menjalankan proses, agar lebih efektif dan membantu selama proses pemberdayaan berlangsung. Kategori sebagai fasilitator ini, sejumlah peran yang lebih spesifik dapat ditentukan, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, membantu dalam hal keterampilan dan sumberdaya serta pengorganisasian.

2. PERANAN FASILITATOR SEBAGAI PENGAJAR DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Hasil Penelitian : Glyn Thomas

Jenis : Jurnal internasional

¹⁹ <http://jurnal.internasionalperananfasilitator211NiniesArdhiani//.com> diposting 14 maret 17.00 disolonet

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode yang digunakan diantaranya adalah wawancara mendalam (indeep interviewing) dan observasi. Sedangkan pemaparan yang dijabarkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu.

Tulisan ini mengulas literatur kelompok konselor pendidikan dan mempertimbangkan implikasi untuk praktek fasilitator pendidikan. Berbeda dengan sastra fasilitasi, literatur dari bidang konseling kelompok, psikoterapi kelompok, dan kerja kelompok lebih eksplisit tentang strategi yang dapat digunakan untuk melatih, mengembangkan dan mendidik praktisi dalam bidang. Penggunaan mengajar didaktik, observasi, partisipasi pengalaman, dan kepemimpinan pengalaman dibahas dan implikasi untuk praktek fasilitator pendidikan dan penelitian di masa mendatang diidentifikasi. Ini termasuk kebutuhan untuk: membantu fasilitator muncul untuk membentuk suatu orientasi teoritis eksplisit; mendorong diskusi eksplisit tentang strategi pendidikan fasilitator; menutup kesenjangan peneliti-praktisi. Fasilitator juga bertugas dalam mengembangkan pengetahuan dimasa mendatang dan masalah pembelajaran bagaimana fasilitator dapat memberdayakan murid sebagai penerus kemajuan dunia, tidak hanya pasif sebagai pengajar tapi lebih focus dalam mengembangkan potensi anak didik. Setelah beberapa temuan dan penelitian maka ditemukan kemajuan cara ini sebagai teknik pembelajaran baru yang akan sangat membantu anak didik. Fasilitator

commit to user

dilakukan oleh beberapa pengajar diberbagai sekolah internasional seperti amerika, belanda, cina, jepang, Malaysia, dan beberapa Negara lain yang secara pendidikan lebih maju daripada Negara lain.

c. Teori

1. Teori pemberdayaan

Secara konseptual, dalam penelitian ini didasarkan atas teori pemberdayaan. Yang secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto,1997:210-224).

Kelompok lemah dan ketidakberdayaan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misal ditindas oleh struktur social yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender ataupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing .
- c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas social ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat. Adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai deviant (penyimpangan). Mereka sering kali dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka

sering akibat dari adanya kurang adilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif²⁰ juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk kepada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang dimulai dari pendidikan dan politasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan yang mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan social diberikan, segenap upaya dapat dikosentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran

²⁰ Suharto,1997:215). Parson et.al.(1994:106 Suharto Edi,Ph.D., (2005): *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*)

perubahan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
2. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap

memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Dalam hal ini pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu :

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan :** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan :** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah eksploitas kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan :** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong

commit to user

masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2. Teori Tindakan sosial

Dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu ada semacam konsesus yang luas yang mengandung pengertian kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu ilmu pengetahuan, begitu juga dengan sosiologi. Definisi paradigma adalah sesuatu yang mendasar dan sesuatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang senantiasa dipelajari.

George Ritzer merumuskan pengetahuan paradigma itu secara lebih jelas dan terperinci. Menurutnya paradigma adalah pandangan yang mendasar dan ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari untuk cabang ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya serta menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut (Ritzer, 1992: 8).²¹

²¹ Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. JUakarta : Raja Grafindo Persada hal: 8

Ritzer dalam memandang sosiologi adalah sebagai suatu ilmu multi paradigmatis. Menurut beliau ada 3 (tiga) paradigma yang secara fundamental berbeda satu sama lain, adapun paradigma yang dimaksud adalah paradigma fakta sosial, definisi sosial dan paradigma perilaku sosial (social behavior) (Johnson, 1988 : 55). Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah Paradigma definisi sosial, Exemplar paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dan karya Max Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (social action).

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan nyata diarahkan kepada orang lain juga dapat berupa tindakan yang “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari suatu situasi tertentu. Weber merumuskan tindakan sosial sebagai berikut:

“Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat pembatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dan situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dan pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu” (Ritzer, 1992 : 44)²². Keluar dan konsep tersebut, Weber mengemukakan 5 (lima) ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yakni:

²² Ibid 44

1. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif. mi meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya atau bersifat subyektif.
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dan suatu situasi, tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain (Ritzer, 2003 : 39)²³

Dari lima ciri pokok tindakan sosial dan Weber diatas mengandung kewajiban dan hak fasilitator dalam pemberdayaan. Ciri-cini yang merupakan kewajiban fasilitator dalam pemberdayaan ini adalah tindakan manusia yang menurut siaktor mengandung makna yang subyektif, tindakan itu arahkan kepada seseorang atau beberapa individu dan tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. Akan tetapi dari cini-ciri tindakan sosial diatas fasilitator selain memiliki kewajiban juga memiliki hak. Adapun hak dari fasilitator yaitu tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya atau bersifat subyektif dan tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan adalah sepenuhnya hak fasilitator.

²³ Ibid 39

Weber membedakan pula rasionalitas tindakan kedalam 4 (empat) tipe, yaitu:

1. *Zwerk rational*

Merupakan tipe tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya menilai tindakan itu baik atau tidak untuk menginterpretasikan sebuah argumen.

2. *Werkrational action*

Tipe tindakan ini aktor dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain.

3. *Affectual action*

Tindakan yang dibuat-buat. Tindakan yang dipengaruhi oleh emosi dan tidak rasional.

4. *Traditional action*

Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja (Ritzer, 2003 : 404)²⁴.

Dari tipe rasionalitas tindakan menurut Weber diatas, maka penelitian peranan fasilitator dalam pemberdayaan guna meningkatkan repement rate pada program nasional pemberdayaan masyarakat di desa bulakan menggunakan tipe *zwerk rasional* dan *werkrational action*, karena merupakan fungsi fasilitator dalam melaksanakan kewajiban dan haknya. Ini dikarenakan tipe rasionalitas tindakan yang lain, yaitu *affetual action*

²⁴ Ibid 40-41

dan tradisional action bias digunakan oleh fasikitator dalam menjelaskan fungsinya dan antara hak dan kewajiban.

Dari beberapa uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan sosial merupakan dimana proses actor terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan subyektif tentang cara dan sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi oleh bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi situasi yang bersifat sebagai kendala.

G. Kerangka Berpikir

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pemberdayaan dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat miskin yang mandiri agar dapat mengatasi kemiskinannya, pada kegiatan lingkungan salah satunya dengan cara pembangunan secara ekonomi bagi masyarakat miskin.

Dalam PNPM-MP pengelolaan seluruh kegiatan baik pembangunan ekonomi melalui kegiatan ekonomi bergulir, bantuan sosial maupun pembangunan dasar ekonomi pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan semuanya dilakukan dengan pendekatan bertumpu pada kelompok. Pendekatan semacam ini menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan

commit to user

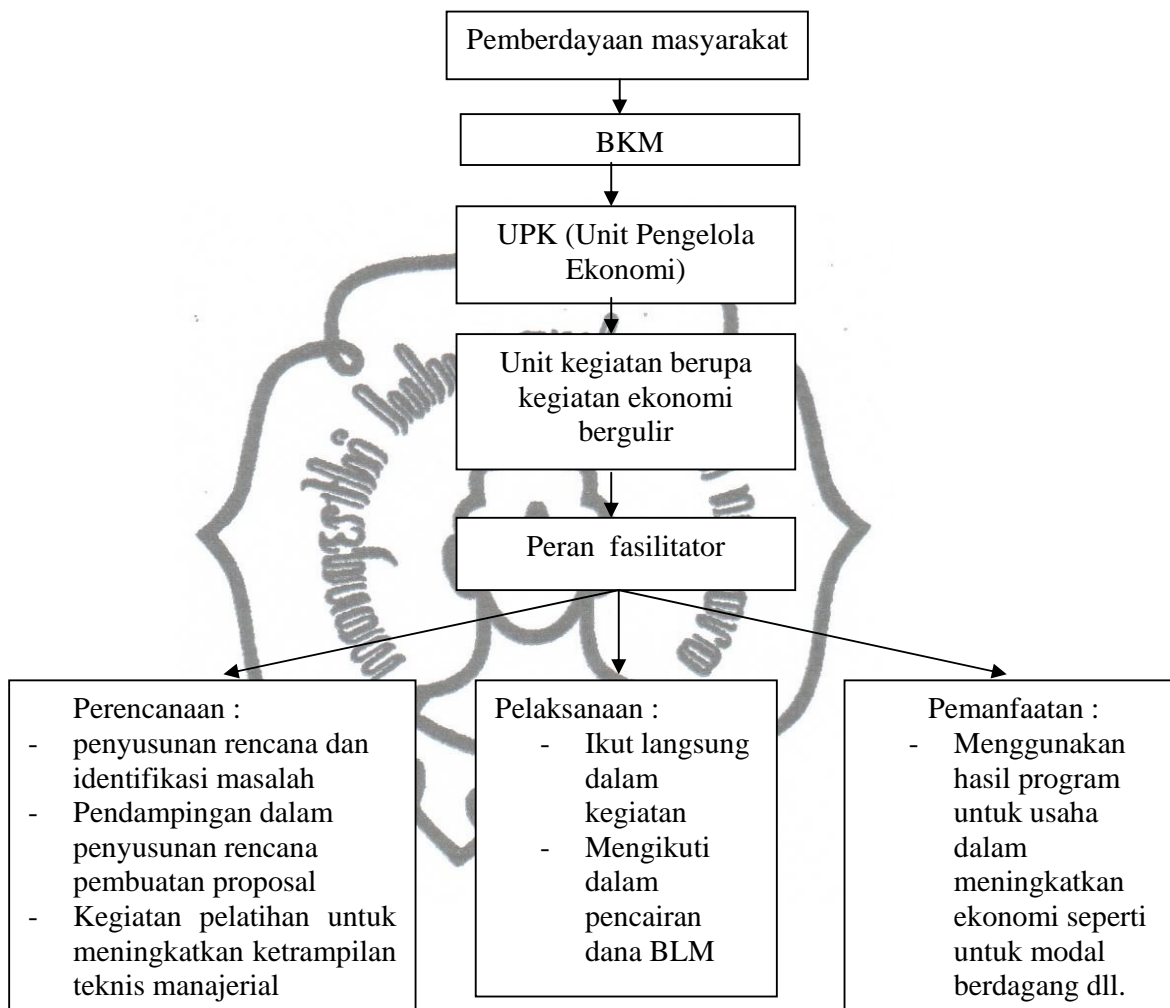
ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperkuat kelembagaannya.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP dalam pemberian dana bergulir didesa Bulakan, meliputi pengembangan institusi lokal dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Adapun pengembangan institusi lokal disini meliputi pembentukan BKM dan KSM. Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yaitu pendampingan fasilitator (faskel) dalam penyusunan rencana kegiatan BKM dan permasalahan yang dihadapi, penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM dan permasalahan yang dihadapi, sosialisasi pengorganisasian masyarakat untuk pembentukan KSM dan permasalahan yang dihadapi serta kegiatan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penciptaan peluang usaha baru dan peluang pembangunan secara ekonomi.

Dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP ini, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pembentukan institusi lokal yaitu BKM dan KSM ini juga dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri, sehingga dengan begitu akan timbul sikap kemandirian dan kesatuan rasa kebersamaan kelompok. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hasil dari pelaksanaan program sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk memperjelas alur pikir, maka penulis tuangkan dalam skema berikut ini :

commit to user

Skema Kerangka Berpikir
Diagram



H. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian kualitatif merupakan bahan acuan dalam penyusunan pedoman wawancara yang meliputi :

1. Peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Konsep peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan fungsi fasilitator dengan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang harus dilaksanakan dalam sesuatu kegiatan pemberdayaan .
2. Fasilitator adalah sekumpulan orang yang terorganisir dan terlatih untuk melakukan perubahan kesadaran kritis dan pola pikir serta menggerakkan proses pemberdayaan didalam suatu wilayah masyarakat untuk mencapai suatu target dalam proses pemberdayaan.
3. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berakar pada kata ilmiah sebagai keutuhan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisa data secara kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil²⁵

²⁵ (lexy Moleong, 1991:4-8)

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di RT 01 dan RT 02 RW IV Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Bulakan merupakan salah satu kelurahan yang merupakan pelaksana PNPM-MP. Dipandang representatif mewakili daerah lain yang juga melaksanakan PNPM-MP. Di daerah ini telah berjalan program PNPM-MP selama dua kali.
- b. Penerima manfaat dalam kegiatan ekonomi bergulir minimal dapat dimanfaatkan oleh 100 % dari KK miskin di Kelurahan Bulakan.
- c. Lokasi penelitian letaknya terjangkau oleh kemampuan peneliti.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang diberikan oleh informan. Mereka diwawancarai untuk mencari informasi tentang peranan fasilitator dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari beberapa anggota BKM dalam kegiatan lingkungan dalam pelaksanaan program PNPM-MP di desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini berasal dari buku-buku, arsip serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen tersebut adalah data monografis dan geografis desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh fasilitator yang ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir dikelurahan Bulakan. Sedangkan dalam memilih responden agar representatif peneliti membaginya dalam beberapa karakteristik dan sebanyak 6 orang fasilitator dan asisten kota yang berperan dalam kegiatan ekonomi bergulir adalah sebagai berikut, berdasarkan jenis kelamin.

b. Sampel

Sampel yang diambil dari populasi dalam penelitian ini bukan sesuatu yang mutlak artinya sampel yang akan diambil menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini sampel berfungsi untuk menggali beragam informasi dan menemukan sejauh mungkin informasi penting. Dalam memilih sampel yang lebih utama adalah bagaimana menentukan sampel sevariatif mungkin berikutnya dapat

dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dulu sehingga dapat dipertentangkan.

5. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pada prinsipnya metode wawancara sama dengan metode angket. Perbedaannya, pada angket pertanyaannya secara tertulis, sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan (bertatap muka secara langsung dengan responden). Dalam wawancara mendalam alat untuk mengumpulkan data disebut dengan pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskannya kepada responden²⁶. Diharapkan dengan adanya wawancara mendalam ini data mengenai peranan fasilitator dapat diperoleh dari fasilitator yang berperan serta ikut andil dalam kegiatan ekonomi bergulir di Kelurahan Bulakan.

b. Observasi Peranan

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Observasi dilakukan dengan jalan formal maupun non formal. Metode ini mampu

²⁶ (Sanapiah Faisal dalam bukunya *format-format penelitian sosial* hal : 52)

mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi dilaksanakan pada saat pertemuan yang diadakan oleh masyarakat setempat serta pertemuan kelompok (UPK).

c. Mencatat Dokumen

Adalah pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dokumen, laporan pelaksanaan UPK, data demografi penduduk dan sebagainya. Dokumen yang diperoleh adalah data penduduk Kelurahan Bulakan serta laporan pembukuan pelaksanaan UPK.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis datanya menggunakan model analisis interaktif (*interactive model analysis*). Ada tiga komponen pokok yang terdapat dalam model analisis interaktif, yaitu :

a. Data Reduction (reduksi data)

Merupakan sajian dari analisis, yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Data *Display* (sajian data)

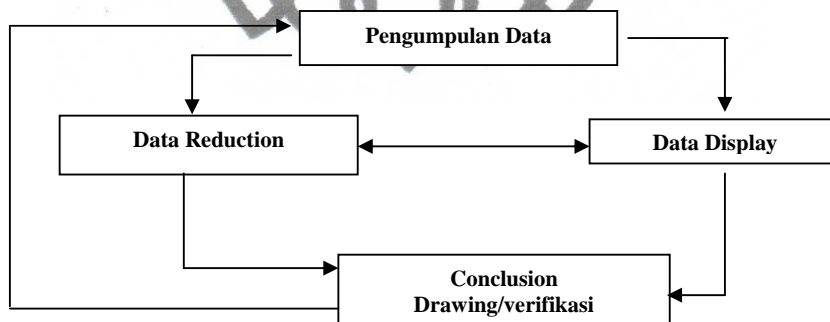
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain yang berdasarkan pengertian tersebut.

c. *Concluding Drawing* (kesimpulan)

Merupakan kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang ada dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan sahih. Proses analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang terkumpul. Setelah data direduksi, kemudian melakukan penyajian data yang dirakit dalam suatu organisasi data. Selanjutnya data tersaji itu dianalisis untuk memperoleh jawaban atau kesimpulan penelitian. Untuk memperjelas uraian di atas perlu disimak skema analisis interaktif menurut pendapat H.B.Sutopo, yaitu sebagai berikut:

Model Analisis Interaktif



(Sumber : Sutopo , 2002 : 96)

7. Validitas data

Dalam menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka untuk menjamin validitas data akan dilakukan dengan cara yang disebut “trianggulasi sumber”. Pengumpulan datanya dilakukan dengan

commit to user

cara menggunakan berbagai sumber yang berbeda dan tersedia. Oleh karena itu data yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi sumber maka data akan lebih terjamin validitasnya.



BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. Deskripsi Lokasi Kelurahan Bulakan

1. Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan gambaran lengkap yang berisi paparan tentang lokasi penelitian dan lingkungannya. Gambaran penelitian ini terbagi beberapa bagian yang dimulai tentang kondisi geografis dan demografi, karakteristik masyarakat, pemerintah dan organisasi masyarakat. Kelurahan Bulakan secara administratif terbagi atas 10 RW, 32 RT dan 4 lingkungan.

2. Batas Wilayah

Kelurahan Bulakan merupakan salah satu desa atau kelurahan diwilayah Kecamatan Bulakan Kabupaten Sukoharjo. Kelurahan Bulakan berbatasan dengan beberapa Desa atau Kelurahan lainnya, Kelurahan Bulakan yang terletak di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ini memiliki batas-batas wilayah Kelurahan yaitu :

- a. Sebelah timur : Kelurahan Kriwen
- b. Sebelah barat : Berbatasan langsung dengan Kelurahan Serenan
- c. Sebelah utara : Kelurahan Dukuh
- d. Sebelah selatan : Kelurahan Tambakboyo

3. Luas Wilayah

Luas wilayah sekitar 301.8195 Ha. Dimana wilayah tersebut terbagi kedalam perkampungan, irigasi teknis, sawah tadah hujan, tegalan/perkebunan. Adapun tata guna lahan di Kelurahan Bulakan dapat disimak sebagai berikut :

Tabel. 2
Sarana lingkungan di Kelurahan Bulakan

No.	Penggunaan tanah	Luas (Ha) / jumlah
1.	Jalan	34.000 m
2.	MCK umum	2 buah
3.	Jembatan	4 buah
4.	Kondisi masih tanah	15.000 m
5.	Kondisi makadam	9.000 m
6.	Kondisi perlu Rehap	24.000 m
7.	Kondisi baik	10.000 m

Sumber : Monografi Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa penggunaan lahan untuk jalan di Kelurahan Bulakan seluas 34.000 M dan terdiri dari jalan yang masih tanah 15.000 M sedangkan yang sudah di makadam sekitar 9.000 M dan kondisi yang perlu dilakukan rehap sekitar 24.000 M, sedangkan kondisi jalan yang dikategorikan baik hanya seluas 10.000 M. Hal ini menandakan bahwa kondisi jalan yang berada Kelurahan Bulakan merupakan jalan seharusnya perlu dilakukan perbaikan atau pembangunan. Sesuai dengan kemampuan masyarakat Kelurahan Bulakan, pembangunan

commit to user

yang dilakukan sesuai dengan program PNPM-MP yang dibantu dengan pemerintah desa dan swadaya masyarakat sendiri yang dilakukan dengan sistem gotong royong dari segenap masyarakat.

B. Keadaan Penduduk Bulakan

1. Jumlah Penduduk

Dilihat dari modal dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi kelancaran pembangunan sebuah masyarakat desa/kelurahan. Pertambahan penduduk disatu pihak sebagai tambahan bagi suplai tenaga kerja berhadapan dengan terbatasnya tanah dan kesempatan kerja di sektor pertanian telah menyebabkan meningkatnya tekanan tenaga kerja atas tanah dan menimbulkan permasalahan dalam hal fenomena ketenagakerjaan dan pendapatan penduduk Kelurahan Bulakan. Menurut data Monografi Bulan Februari 2010 disebutkan bahwa jumlah penduduk dengan kepala keluarga 1.565 KK, jumlah penduduk laki-laki 3.503 jiwa dan penduduk perempuan 3.449 jiwa dan warga miskin laki-laki 1146 jiwa sedangkan perempuan 1222 jiwa, sedangkan balita 874 jiwa.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Untuk mengetahui dengan jelas keadaan penduduk Kelurahan Bulakan menurut mata pencaharian dapat kita perhatikan tabel berikut :

Tabel. 3
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)	Persen (%)
1.	Petani sendiri	442 orang	9,56
2.	Buruh Tani	1810 orang	39,17
3.	Nelayan	-	-
4.	Wiraswasta	367 orang	7,94
5.	Karyawan Swasta	108 orang	2,23
6.	Buruh bangunan	465 orang	10,06
7.	Pedagang	401 orang	8,68
8.	Buruh mebel	645 orang	13,96
9.	Guru / PNS	25 orang	0,54
10.	TNI/POLISI	3 orang	0,06
11.	Pensiunan	15 orang	0,32
12.	Lain-lain	339 orang	7,37
Jumlah		4620	100%

Sumber data : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk di Kelurahan Bulakan dapat dikatakan beragam, karena penduduk Kelurahan Bulakan tidak terpaku pada salah satu mata pencaharian saja. Hanya saja petani atau buruh tani serta buruh mebel merupakan dua jenis mata pencaharian yang mendominasi penduduk Kelurahan Bulakan yang utama, disamping itu ada beberapa jenis mata pencaharian lain seperti di bidang pedagang, wiraswasta, karyawan pabrik, pegawai negeri sipil dan sebagainya, meskipun jumlahnya sedikit.

Hal terlihat sangat mengejutkan adalah mata pencaharian lain-lain yang cukup signifikan mampu menampung mayoritas luberan

commit to user

ketenagakerjaan di Kelurahan Bulakan. Tabel diatas memperlihatkan, dimana mata pencaharian lain-lain tersebut mampu menyedot 339 jiwa. Ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait di Kantor Kelurahan sektor ketenagakerjaan Bulakan apa saja termasuk ke dalam sektor lain-lain tersebut, diperoleh jawaban bahwa sektor-sektor lain tersebut adalah terdiri dari sektor informal, jasa, dan kerjo boro atau menjadi migran non permanen di daerah lain seperti solo dan sekitarnya.

Tapi ada indikasi bahwa sektor lain-lain juga termasuk angkatan kerja yang masih duduk dibangku sekolah mengingat standar usia yang dipakai dalam monografi ini memakai standar usia diatas sepuluh tahun (10 tahun ke atas). Atau bisa mereka yang masih menganggur terutama adalah angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi. Golongan ini nampaknya masih menunggu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan standar yang selama ini mereka alami.

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Sedangkan distribusi penduduk Kelurahan Bulakan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4
Komposisi Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Kelurahan Bulakan Bulan Juni 2010

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Dalam Persen
1.	Perguruan tinggi D3/ S1	91 orang	2,02%
2.	Perguruan tinggi S2	1 orang	0,02%
3.	Tamatan SLTA	909 orang	20,19%
4.	Tamatan SLTP	1192 orang	26,48%
5.	Tamatan SD	1657 orang	36,81%
6.	Tidak tamat SD	326 orang	3,24%
7.	Belum tamat SD	-	-
8	Buta huruf	326 orang	7,24%
	Jumlah	4502 orang	100%

Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Bulakan tergolong masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah lulusan Akademi dan Perguruan Tinggi yang berjumlah 91 orang, dan jenjang S2 hanya 1 orang hal ini memberikan indikasi yang kurang positif bagi pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Bulakan karena bisa dikatakan mempunyai sumber daya manusia yang kurang mumpuni, namun meskipun tingkat pendidikan yang masih sangat kurang, masyarakat Kelurahan Bulakan menyambut program PNPM-MP dengan positif dan antusias hal ini sangat baik sekali dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

C. Sarana Dan Prasarana

1. Sarana Sosial Budaya

a. Jumlah Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang ada dalam satu daerah dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, sarana pendidikan tersebut tentunya merupakan tuntutan kebutuhan serta kesadaran akan pentingnya faktor pendidikan bagi warganya namun meskipun sarana dan prasarana pendidikan yang masih relatif kurang, masyarakat Kelurahan Bulakan dapat menuntut ilmu dan bersekolah dikota-kota besar yang terdekat yang sesuai yang diinginkan. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan yang ada dikelurahan Bulakan dapat kita lihat dibawah ini :

Tabel. 5
Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kelurahan Bulakan

No.	Pendidikan umum	Gedung
1.	TK	4
2.	SD	3
3.	SLTP	1
4.	SLTA	-
5.	Perguruan Tinggi	-
6.	Madrasah	1
Jumlah		9

Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

Untuk sarana pendidikan TK, SD, SLTP, madrasah, jumlah tersebut sudah cukup memadai bagi masyarakat Bulakan. Namun untuk sarana pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi di Kelurahan Bulakan tidak memilikinya. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke SLTA harus ke pusat Kota. Dengan demikian untuk sarana dan prasarana pendidikan seharusnya dibangunnya SLTA agar masyarakat Bulakan dapat lebih memenuhi kebutuhannya di sektor pendidikan, dan dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi dipusat-pusat kota yang terdekat.

b. Jumlah Sarana Tempat Ibadah

Tabel. 6
Sarana Peribadatan Kelurahan Bulakan

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	12
2.	Gereja	1
3.	Pura	-
4.	Pesantren	-
5.	Vihara	-
6.	Mushola	-
Jumlah		13

Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2009

Seperti telah diketahui bahwa jumlah penduduk kelurahan Bulakan yang memeluk agama islam merupakan mayoritas jumlah pemeluk yang terbesar di kelurahan tersebut. Untuk itu sarana

commit to user

peribadatan yang berupa masjid jumlahnya cukup banyak. Hal ini dimungkinkan untuk menampung jamaahnya cukup besar tersebut. Sedangkan tempat peribadatan lain seperti Gereja hanya berjumlah satu buah sedangkan tempat ibadah lain seperti pura, vihara, mushola tidak terdapat didesa Bulakan, begitu juga tempat pendukung jalannya ibadah seperti pesantren tidak ada . Meskipun demikian penduduk di kelurahan Bulakan sangat religius dan bertoleransi dengan agama satu dengan yang lain sehingga tidak adanya konflik agama yang terjadi berdasar keterangan warga sekitar.

Adapun sarana prasarana ekonomi yang berada di kelurahan Bulakan yang tergambar pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel. 7
Sarana Prasarana Ekonomi Kelurahan Bulakan

No.	Jenis prasarana ekonomi	Jumlah
1.	Warung kecil	10 Buah
2.	Toko / Ruko	46 Buah
3.	Pasar	1 Buah
4.	Mini market	-
5.	Bengkel	10 Buah
6.	Koperasi Simpan Pinjam	2 Buah
7.	Bank	1 Buah
8.	Industri kecil Rumah Tangga	502 Buah

Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

Untuk sarana prasarana ekonomi seperti adanya warung kecil, Toko/ruko, Pasar, Bengkel, Koperasi Simpan Pinjam, Bank dan industri rumahan jumlah tersebut membuktikan bahwa kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bulakan sangat berjalan dengan baik. Namun untuk kemajuan dalam bidang perekonomian harus membutuhkan modal sangat banyak dan pinjaman yang lunak bagi masyarakat di Kelurahan Bulakan agar seperti industri kecil rumahan dapat berkembang lebih maju dan dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Hal ini adalah tugas pemerintah yang terkait yang harus lebih sensitif dan memperhatikan masyarakatnya dalam bidang ekonomi.

c. Karakteristik masyarakat

Berkaitan dengan keadaan sosial budaya masyarakat di wilayah Kelurahan Bulakan mempunyai karakteristik tersendiri, karakteristik masyarakat yang terbentuk disebabkan karena lokasi Kelurahan tersebut. Karakteristik masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakatnya, Kelurahan Bulakan ini memiliki karakteristik masyarakat yang tata kehidupannya adalah pola kehidupan pedesaan dengan masyarakat yang homogen. Bisa dilihat dari data-data monografi diatas. Kehidupan masyarakatnya lebih cenderung bersifat bergotong royong, sehingga masyarakatnya cenderung lebih memperhatikan prinsip gotong royong serta prinsip kemasyarakatan.

d. Sistem pemerintahan dan organisasi

Organisasi yang ada dalam pemerintahan itu adalah sebagai berikut :

1. Organisasi/lembaga formal, meliputi :

- Pemerintah desa
- BPD (Badan Perwakilan Desa)
- LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
- PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)
- Satgas Limas (Satuan Petugas Lingkungan Masyarakat)

2. Organisasi/lembaga formal, meliputi :

- Kelompok pengajian.
- Paguyuban di tingkat RT maupun RW
- Perkumpulan olah raga dll

e. Kondisi Kemiskinan Di Kelurahan Bulakan

Penyebab kemiskinan di Kelurahan Bulakan dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut *Buku Laporan PJM pronangkis Desa Bulakan tahun 2009-2010*) menyatakan bahwa :

Permasalahan bidang sosial, meliputi :

1) Bidang kesehatan

- a) Masih terdapatnya balita yang bergizi buruk,
- b) Tingkat kesehatan ibu hamil yang masih rendah
- c) Adanya warga yang mengidap penyakit berpotensi menular.

commit to user

Hal ini disebabkan karena :

- a. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup sehat dengan pola hidup yang kurang baik (kebersihan rumah, lingkungan dan pola-pola hidup seperti makan, minum, mandi, cuci dan membuang hajat di Sungai.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan terutama masalah kesehatan.
- c. Rendahnya tingkat penghasilan keluarga.
- d. Tata ruang wilayah yang belum tertata dengan baik pada beberapa wilayah kebanyakan seperti belum adanya tempat pembuangan sampah, WC umum, saluran pembuangan limbah rumah tangga, jalan yang masih rusak dan belum di bangun dengan baik.
- f. Sarana Kesehatan di Kelurahan Bulakan

Tabel. 8

Sarana Kesehatan Kelurahan Bulakan

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Puskesmas	-
2.	Posyandu	11
3.	Puskesmas Pembantu	1
4.	Dokter Praktek	1
5.	Bidan Praktek	2
6.	Apotik	1
7.	Poliklinik	1
8.	Pengobatan Alternatif	-

Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

- 1) Bidang pendidikan
 - a. Masih terdapatnya anak sekolah yang rawan drop out karena masyarakat kurang memperhatikan pentingnya masalah kesehatan dan pendidikan anak.
 - b. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan.
 - c. Masih adanya anak usia sekolah yang memilih untuk bekerja untuk membantu mencari nafkah guna menyambung hidup sekeluarganya.
- 2) Permasalahan bidang ekonomi
 - a) Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Bulakan sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatannya adalah kurangnya modal usaha.
 - b) Kurang adanya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berusaha
- 3) Permasalahan bidang lingkungan
 - a) Banyaknya jalan yang rusak
 - b) Saluran pembuangan air yang kurang berfungsi dengan baik.
 - c) Masih terdapatnya rumah warga yang kurang layak huni.

Berikut ini dapat dicermati dengan jelas gambaran Kemiskinan di Kelurahan Bulakan.

Tabel. 9
Penerima Bantuan PNPB-MP Kelurahan Bulakan

No.	Masalah	Jumlah	Dalam persen
1.	Kesehatan ibu hamil	67 orang	15,69%
2.	Balita kurang gizi	176 orang	41,22%
3.	Ekonomi kecil	50 orang	11,71%
4.	Orang jompo	49 orang	11,47%
5.	Penyakit menular	85 orang	19,91%
Jumlah		427 orang	100%

Sumber data : Monografi Dinamis Kelurahan Bulakan Bulan Februari 2010

D. Deskripsi Lokasi RW IV

Adapun jumlah penduduk RW IV seluruhnya adalah 638 orang, dengan jumlah 318 untuk perempuan dan 320 untuk laki-laki. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah memfokuskan di wilayah RW IV RT 01 dan 02 Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

1. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

Wilayah ini berdekatan dengan lingkungan pabrik/industri. Ternyata keberadaannya memberikan pengaruh kepada karakteristik masyarakat sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik/karyawan. Berikut adalah data penduduknya beserta jumlah penduduk berdasarkan umur :

Tabel 10

Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di RW IV

No.	Umur	Jumlah	Dalam persen
1.	0-4	12 orang	1,87%
2.	5-9	19 orang	9,37%
3.	10-14	44 orang	10,62%
4.	15-19	46 orang	10%
5.	20-24	61 orang	5,62%
6.	25-29	119 orang	3,12%
7.	30-35	126 orang	17,54%
8.	40-49	125 orang	20,62%
9.	50-59	52 orang	14,37%
10.	60+	34 orang	6,87%
Jumlah		638 orang	100%

Sumber : Data Dinamis RW 04 Bulan Januari Tahun 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif (15-59) tahun sebesar 529 jiwa, sedangkan untuk usia belum produktif (0-14) tahun sebesar 75 jiwa. Sedangkan untuk usia tidak produktif (60+) tahun sebesar 34 jiwa. Dalam penelitian ini memfokuskan pada bentuk kegiatan ekonomi bergulir dalam PNPM-MP.

2. Mata Pencarian RW IV

Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan RW IV

No.	Jenis pekerjaan	Wilayah	Dalam persen
		RW 04 (Orang)	
1.	Petani sendiri	23	10%
2.	Buruh tani	32	13,91%
3.	Nelayan	-	-
4.	Pengusaha	13	5,65%
5.	Buruh industri	48	20,87%
6.	Buruh bangunan	25	10,87%
7.	Pedagang	33	14,35%
8.	Pengangkutan	15	6,52%
9.	Pegawai negeri (sipil/ABRI)	19	8,26%
10.	Pensiunan	12	5,22%
11.	Lain-lain	10	4,35%
	Jumlah	230	100%

Sumber data : Monografi Dinamis RW 04 Bulan Januari 2010

Dari data diatas bisa dikatakan bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat khususnya di RW IV adalah buruh tani dan buruh industri yang terlihat dari monografi desa bulakan yang masih terdapat lahan persawhan dan pabrik-pabrik seperti contoh pabrik pembuatan mebel dan hal ini sangat berpengaruh karena tingkat pendidikan masyarakat didesa bulakan, dapat dilihat pada tabel berikutnya.

3. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Sedangkan distribusi penduduk RW IV menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

commit to user

Tabel 12
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan RW IV

No.	Jenjang pendidikan	JUMLAH
		RW 04 (orang)
1.	Tamat akademi	4
2.	Perguruan tinggi	1
3.	Tamatan SLTA	62
4.	Tamatan SLTP	48
5.	Tamatan SD	110
6.	Tidak tamat SD	74
7.	Belum tamat SD	23
	Jumlah	318

Sumber data : Monografi Dinamis RW 04 Bulan Januari 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk RW IV Kelurahan Bulakan tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah lulusan SD yang berjumlah 110 Orang dan belum tamat SD 23 orang dan tamat akademi sebagai pendidikan paling tinggi RW IV berjumlah 4 orang saja.

4. Karakteristik masyarakat

Masyarakat RW IV merupakan salah satu masyarakat yang sistem pemerintahnya dikategorikan sebagai lingkungan Dusun. Hampir seluruh masyarakat bekerja di sektor swasta. Perempuan mendominasi pada sektor swasta. Hal ini bisa dilihat dari data mata pencaharian penduduk, bahwa yang mereka bekerja disektor non swasta. Rata-rata penduduk di wilayah ini bekerja sebagai buruh disekitar tempat tinggalnya, hal ini dilakukan karena tingkat ekonomi keluarga cukup rendah sehingga seorang

commit to user

perempuan dituntut untuk dapat membantu perekonomian keluarga agar pemenuhan kehidupan rumah tangga dapat tercukupi tanpa harus meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh. Meskipun demikian jiwa kegotong-royongan masyarakat di wilayah ini sangat kuat, sehingga mendukung struktur pemerintahan yang kuat serta penataan wilayah yang rapi. Hal ini bisa terlihat dari berjalannya PNPM-MP secara sistematis di wilayah ini.

5. Kondisi kegiatan pinjaman ekonomi bergulir RW IV

Dana bergulir ini berwujud uang pinjaman yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha. Adapun syarat dan mekanisme pinjaman adalah :

- a. Penerima manfaat adalah 100 % terdiri KK dari KK miskin
- b. Merupakan penduduk desa atau kelurahan setempat
- c. Memiliki usaha atau akan mendirikan suatu usaha
- d. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat dengan jumlah 1kelompok terdiri dari 5 – 10 orang
- e. Menganut sistem tanggung renteng dalam kelompoknya
- f. Pinjaman awal Rp. 500.000 per orang, bisa meningkat jika aktif dalam pengembaliannya dan berhak memperoleh IPTW
- g. Melengkapi syarat berupa pengisian Proposal, KTP dan KK sebagai identitas
- h. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam kegiatan ekonomi bergulir

Masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Bulakan khususnya di RW IV sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan ekonomi bergulir ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, selain itu juga dapat memberikan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu.

Adapun gambaran penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir di Kelurahan Bulakan khususnya RW IV adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Data Penerima Manfaat Kegiatan Ekonomi Bergulir KSM Mesra di RW IV

Melati RT 01, RW IV	Mawar RT 1, RW IV	Flamboyan RT 1, RW IV
Darmawanti	Walidi	Gi handoyo
Wasiyatun	Sriyono	Sunarti
Sutini	Wiyono	Suharti
Suwanti	Kasino	Sunardi
Sumarni	Cipto wiyono	Saikem
Matahari RT 2, RW IV	Cempaka RT 2, RW IV	Kenongo RT 2, RW IV
Wiro sunarto	Sumardi	Suparno
A.edi purwanto	Sunarmo	Sutarto
Sri kayali	Waluyo	Sukiman
Sukarno	Sardi	Sukarno
Suhardi		Sutarmi
Anggrek RT 1, RW IV		
Sakiyem		
Mulyanti		
Puji suparmi		
Sardiyanto		
Waginem		

Sumber data : Monografi Dinamis RW 04 Bulan Januari 2010

E. Deskripsi Program PNPM-MP

1. Pelaksanaan Kegiatan Tridaya

Pelaksanaan kegiatan TRIDAYA dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sonorejo meliputi :

- a. Kegiatan Lingkungan dengan alokasi 70 % dari total dana BLM (Bantuan langsung Masyarakat);
- b. Kegiatan Ekonomi dengan alokasi 20 % dari total dana BLM;
- c. Kegiatan Sosial dengan alokasi 10 % dari total dana BLM.

Adapun total dana yang diterima BKM Sumber Makmur Kelurahan Bulakan sebesar Rp. 200.000.000,- dikucurkan dalam 3 tahapan dengan pembagian 30% dari total dana BLM pada tahap 1, dan sebesar 50% dari total dana BLM pada tahap 2 dan 20% dari total dana BLM pada tahap 3.

2. Penerapan Kegiatan Tridaya PNPM-MP di Kelurahan Bulakan

Kegiatan Lingkungan yang didanai oleh BLM PNPM-MP sebagai stimulant dengan dukungan dari swadaya masyarakat adalah pembuatan talud, pembuatan rabat beton, pembuatan MCK, dan pengaspalan jalan.

Kegiatan Ekonomi perguliran di Kelurahan Bulakan dinilai sangat berhasil membantu masyarakat pra sejahtera dalam rangka meningkatkan perekonomiannya, walaupun pada awalnya hanya 42% dengan berbagai upaya penerapan strategi, sehingga tingkat RR (Pengembalian dana ekonomi bergulir) mencapai angka 91% pada Bulan 2010 ini.

Kegiatan Sosial yang dilakukan di Kelurahan Bulakan adalah pemberian ternak ayam pada tahap 1 dan pemberian ternak kambing pada tahap ke 2 dan ke 3, karena berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dengan adanya pemberian ternak ayam dan kambing ini dirasakan sekali adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga pra sejahtera dan dapat menjadi salah satu usaha sebagai mata pencaharian. Adanya ternak ini diharapkan warga masyarakat miskin mampu mengembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

3. Hambatan dan Kendala yang dihadapi BKM Kelurahan Bulakan

Kegiatan Lingkungan :

- a. Pelaksanaan kegiatan terhambat faktor cuaca.
- b. Pembuatan Proposal dan LPJ yang dirasa rumit oleh masyarakat sehingga membutuhkan pendampingan dari fasilitator.
- c. Rendahnya partisipasi perempuan pada kegiatan lingkungan (quota 40% partisipasi perempuan).
- d. Waktu pengerjaan kegiatan lingkungan biasanya dilakukan pada hari libur.

Kegiatan Ekonomi :

- a. Pemahaman masyarakat terhadap program ini yang menganggap bahwa bantuan ekonomi dari pemerintah tidak perlu dikembalikan.
- b. Mayoritas penduduk adalah petani maka terkadang angsuran dilakukan pada saat musim panen tiba.

Kegiatan Sosial :

- a. Pemahaman yang kurang mengenai munculnya skala prioritas penerima manfaat dari kegiatan sosial.
- b. Semua ingin mendapatkan bantuan dari kegiatan sosial.

Hambatan umum yang dialami oleh BKM adalah

- a. Pemahaman masyarakat terhadap program ini yang menganggap bahwa bantuan ekonomi dari pemerintah tidak perlu dikembalikan.
- b. BKM mendapatkan insentif yang tinggi melihat besarnya dana yang dikelola oleh BKM.
- c. Kemampuan BKM untuk melakukan Chanelling dan menjalin Kemitraan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ini.
- d. Tuntutan administrasi proyek yang sangat banyak dan rumit sehingga sangat membutuhkan pendampingan dari fasilitator dan consultan proyek.

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan BKM di Kelurahan Bulakan

Berdasarkan atas masalah yang ada, penyebab dan potensi yang ada dalam penanggulangan kemiskinan, maka strategi yang dilakukan oleh masyarakat BKM Mesra Kelurahan Bulakan dalam mengurangi permasalahan kemiskinan sebagai berikut :

- a. Penanggulangan kemiskinan lebih terfokus pada peningkatan kehidupan masyarakat melalui pendekatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Milenium Deveelpment Goals (MDG's).

commit to user

- b. Meningkatkan kesempatan kehidupan yang sehat baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- c. Meningkatkan kesempatan wajib belajar 9 tahun khususnya kepada warga yang masih mengalami kendala dalam mengenyam pendidikan.
- d. Mengurangi permasalahan-permasalahan sosial maupun dampaknya yang ada di masyarakat.
- e. Meningkatkan kesempatan warga untuk mendapatkan penghasilan yang layak melalui peningkatan ketrampilan, penambahan modal dan manajemen usaha.
- f. Meningkatkan keberlanjutan program kelestarian lingkungan di masyarakat menuju perbaikan tatanan tata ruang dan bangunan yang sehat dan teratur.
- g. Sasaran penerima manfaat sudah terungkap secara jelas by name by address sehingga tidak akan salah sasaran.
- h. Pelaksanaan dan jenis kegiatan/program berdasarkan penetapan prioritas hasil keputusan kebutuhan masyarakat.
- i. Sebagai acuan maka program penanggulangan kemiskinan disusun melalui rencana tahunan (renta Pronangkis) tahun pertama, kedua dan ketiga.
- j. Disandingkan sebagai bagian dari program pembangunan kelurahan, yang menangani masalah kemiskinan.

F. Deskripsi Program Penelitian

Kegiatan ekonomi bergulir merupakan bagian dari Konsep Tri Daya yang dikembangkan dalam PNPB-MP. Upaya ini dimaksudkan untuk menyasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin atau penganggur perlu mendapatkan porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir, UPK tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Untuk itu, UPK diperkenankan dan diharapkan memperkuat kapasitas pelayanan kepada orang miskin dengan melakukan berbagai verifikasi pelayanan pinjaman bergulir yang tepat bagi masyarakat miskin dengan melakukan berbagai verifikasi pelayanan pinjaman dana bergulir yang tepat bagi masyarakat miskin diwilayahnya.

Adapun pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Lingkungan (UPK) merupakan satu-satunya pengelola administrasi keuangan dalam pinjaman bergulir dibawah kendali pengawasan BKM, sementara pengambilan keputusan tetap menjadi wewenang BKM. Selama masa proyek, BKM tidak diperkenankan membentuk unit usaha lain yang bertindak sebagai pengelola keuangan selain UPK.

commit to user

2. Seluruh dana bergulir yang berasal dari BLM harus dikelola oleh UPK. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai KSM yang telah dinyatakan secara sah. KSM merupakan kelompok swadaya masyarakat, yang telah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan kriteria masyarakat tertentu yang terdiri dari 5-10 orang.
3. Pinjaman diberikan kepada anggota KSM melalui kelompok. Dalam kelompok ada ketua kelompok yang akan mengkoordinir anggotanya, tugas yang paling menonjol adalah membagi dana bantuan untuk anggotanya serta dapat menjadi penengah dari aspirasi anggotanya.
4. Tujuan pinjaman harus digunakan untuk peningkatan usaha atau pendapatan. Peminjaman dana harus memenuhi kriteria baku, yaitu punya usaha dan dalam rangka untuk peningkatan pendapatan melalui suatu bentuk usaha. Kriteria usaha yang mendapat bantuan ditentukan berdasarkan standarisasi dari kesepakatan warga setempat.
5. Minimum pinjaman awal per orang Rp.500.000,-/orang. Besar pinjaman disesuaikan dengan kesepakatan dari seluruh anggota kelompok masing-masing.
6. Bunga pinjaman sebesar 1,5 % tetap perbulan. Setiap pembayaran bunga ditambah dengan 0,5% sebagai tabungan (akan dikembalikan pada KSM jika tepat angsuran).
7. Setiap peminjaman dikenakan provis sebesar 1% dari besar pinjaman, dipotong pada saat pencairan.
8. Waktu angsuran pinjaman : maksimum 12 bulan.

commit to user

9. Angsuran dilakukan setiap bulan, sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan serta besarnya pinjaman yang dikordinir oleh ketua kelompok masing-masing.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan disajikan data dan sekaligus analisisnya mengenai peran Fasilitator dalam Kegiatan Ekonomi salah satu kegiatan dari konsep TRIDAYA PNPM-MP yang berupa pinjaman dana bergulir di RT 01 dan 02 RW IV Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan. PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang memfokuskan diri pada kegiatan tridaya yaitu kegiatan ekonomi bergulir, kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan dan pengembangan masyarakat. Berdiri pada tahun 1999 yang dulu bernama P2KP. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, sehingga mereka merasa bukan lagi menjadi objek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Sejak berdiri PNPM-MP telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pemberdayaan dan pengembangan sikap kritis masyarakat. Khususnya dalam

rangka mengantisipasi masalah percepatan pembangunan yang menimbulkan berbagai dampak dan perubahan lingkungan. PNPM-MP yakni membantu proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memperjuangkan haknya untuk hidup secara layak di lingkungan. Pemberdayaan disini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis secara kritis kondisi riil disekitarnya.

Dalam penelitian ini responden dan informan yang diambil sebagai sampel adalah yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Karena penelitian ini tentang peranan Fasilitator dalam rangka meningkatkan Repement Rate dalam kegiatan ekonomi bergulir pada PNPM-MP di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yaitu meliputi Senior Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sosial (CD), Fasilitator Ekonomi yang mendampingi kegiatan ekonomi bergulir dan asisten koordinator kab kota PNPM-MP di RW 04 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan beberapa warga yang mendapatkan manfaat ekonomi bergulir untuk lebih jelasnya data informan dan responden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profil Responden:

- a. Bapak Dade Sarifudin,S.T. Berusia 35 tahun dan beralamat di sragen dan bertugas sebagai asisten koordinator PNPM-MP.
- b. Ibu Siwi Andayani,SH. berusia 38 tahun pendidikan Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan bekerja sebagai Senior Fasilitator di Tim 25 yang mendampingi Kelurahan Bulakan

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, berdomisili di Wonogiri mengikuti suaminya, pengalamannya sebagai Fasilitator Pemberdayaan sudah hampir 10 tahun dan telah berpengalaman diberbagai daerah di Jawa Tengah.

- c. Dhian Artika Mahardini,S.Sos. berusia 27 tahun pendidikan Sarjana Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jurusan Komunikasi. Bertugas sebagai Fasilitator Sosial (CD) di Tim 27 yang mendampingi Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo berdomisili di Perumahan Dinas Kejaksaan Surakarta, ia pernah bekerja di Java Rekonstruksion Fund di Yogyakarta tepatnya mendampingi Kecamatan Imogiri yang menangani program rekonstruksi & rehabilitasi pasca gempa yang selama kurang lebih 2 tahun sebagai Fasilitator Sosial (CD) dan akhirnya menjadi Fasilitator di PNPM-MP wilayah Kabupaten Sukoharjo dan salah satu desa dampungannya adalah Kelurahan Bulakan.
- d. Latief Burhanudin,ST. berusia 30 tahun pendidikan Sarjana Teknik selain bekerja sebagai Fasilitator Teknik di Tim 27 yang mendampingi Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo berdomisili di Klaten, ia juga mempunyai usaha warung internet di rumahnya. Dengan mengelola warung internet tersebut ia berharap dapat menambah pendapatan keluarga dan belajar berbisnis yang bermanfaat untuk masa depannya sendiri.

- e. Ariyanti,SE. Berusia 30 tahun, pendidikan Sarjana Ekonomi bekerja sebagai Fasilitator Ekonomi di Tim 27 yang mendampingi Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo berdomisili di Klaten, dahulu pernah bekerja sebagai marketing disebuah perusahaan perbankan swasta di Surakarta.

Berikut ini penulis akan sajikan matrik karektiristik informan yang mempunyai informasi mengenai peranannya sebagai fasilitator dalam PNPM-MP di bulakan :

Matrik I
Karakteristik Responden

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	Dade Sarifudin, ST.	35 tahun	Asisten koordinator kab.kota PNPM-MP	Sragen
2.	Siwi Andayani, SH.	38 tahun	Senior fasilitator	Wonogiri
3.	Dhian Artika M,S.Sos	28 tahun	Fasilitator CD atau sosial	Solo
4.	Latief Burhanudin, ST.	30 tahun	Fasilitator teknik	klaten
5.	Aryanti, SE.	30 tahun	Fasilitator ekonomi	klaten

Sumber data primer diolah november 2010

2. Profil Informan :

Adapun profil informan akan dipilih enam orang yang mewakili salah satu anggota dari kelompok KSM Mesra RW IV di bulakan yang dirasa keikutsertaan dalam program dalam dana bergulir cukup partisipatif sehingga mampu menjawab dari peranan fasilitator, dengan profil sebagai berikut :

- a. Ibu Darmawanti berusia 40 tahun ini merupakan ketua kelompok Swadaya Masyarakat untuk periode 2008-2010 pada kelompok KSM melati RT01/VI. Beliau bekerja sebagai pedagang memiliki usaha toko klontong dan sebagai seorang ibu rumah tangga karena telah menikah serta memiliki 3 orang anak. Ini tidak lepas karena beliau tinggal dikawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya bertani. Pendidikan terakhir beliau adalah SMP. Meskipun latar belakang pendidikan beliau tidak tinggi, namun beliau sangat peduli dengan masalah perekonomian di Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pak Gi Handoyo berusia 41 tahun tamatan pendidikan formal hanya ditingkat SMA, beliau merupakan kelompok KSM flamboyan di RT01/IV dan menjabat sebagai bendahara yang ditugaskan mencatat keluar masuk pinjaman dana, setelah di PHK pada tahun 2006 dari perusahaan tekstil disukoharjo, sempat bekerja sebagai petani menggarap lahan sendiri disawah, karena adanya program PNPM yang berbasis kepada masyarakat. Akhirnya pak Gi panggilan akrab

didesanya berminat untuk meningkatkan taraf kehidupannya maka ia menjadi anggota KSM ditahun 2006 tak lama setelah ia di PHK. Saat ini dengan adanya dana bergulir pak Gi mencoba usaha berdagang bakso disalah satu pasar disukoharjo dengan sambilannya menggarap sawah, kehidupan pak Gi dirasakan sudah membaik dengan adanya bantuan karena bungannya yang ringan. (Dilihat dari wawancara 21 maret 2010 bertempat di kelurahan bulakan).

- c. Ibu Mulyani berusia 25 tahun ini merupakan anggota KSM anggrek dalam ekonomi bergulir untuk periode 2010. Beliau bekerja sebagai buruh pabrik karena gaji buruh pabriknya tidak mencukupi dalam kebutuhan hidupnya karena suaminya yang menganggur dan bekerja serabutan, maka bu Mulyani berusaha membuka peluang usaha kecil-kecilan yaitu dengan menjual bensin eceran karena letak rumahnya yang berada dipinggir jalan raya, dana modal penjualan bensin diperoleh dari dana bergulir PNPM-MP, karena telah menikah serta memiliki satu orang anak maka ia mencari pekerjaan yang tidak jauh dari rumah. Pendidikan terakhir beliau adalah SMA. Meskipun latar belakang pendidikan beliau SMA, namun beliau sangat peduli dengan masalah perekonomian dan kemajuan di Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo.
- d. Sri Kayali berusia 36 tahun, ibu dua orang anak ini tergabung dalam kelompok KSM matahari di RT02/IV. Sebelum adanya ekonomi bergulir ini ibu dengan 2 orang anak ini sudah berjualan sayur mayor

keliling desa, namun karena keterbatasan modal pada tahun pertama diusahanya, bu Sri ini meminjam modal dana PNPM yang dikucurkan sebesar Rp500.000. Adanty pinjaman modal ini membantu sekali bu Sri dalam menjalankan usahanya kembali. Tamatan pendidikannya hanyalah SMP namun minatnya dalam mjemajukan PNPM-MP didesanya sangata tinggi, terlihat dengan adanya kemauan bu Sri anggota KSM kelompok matahari di RT02/IV.

- e. Bapak Suwardi dengan usia 43 tahun ini merupakan anggota KSM periode 2009-2010 dan bekerja sebagai petani selama 15 tahun, berharap agar masa tuanya bias menabung ia kemudian ikut menjadi anggota KSM kelompok cempaka yang bertugas dikelompoknya sebagai Humas, dengan kata lain sebagai pengingat anggota lain jika belum ada yang mengangsur karena di ekonomi bergulir ini menganut system tanggung renteng, yang dimana ada anggota salah satu tidak menyaur atau kata lain membayar maka anggota lain berhak menegur anggota yang belum mengangsur. Karena didesa bulakan system kekerabatan sangat erat, maka pak Wardi mau dipilih oleh anggota lain dikelompok KSM nya sebagai Humas karena dianggap paling sepuh/tua. Walau hanya lulusan SD ia mau bekeja keras dan berusaha.
- f. Pak Sutarto merupakan tamatan SMA dengan usia 39 tahun, ia bekerja sebagai pengrajin mebel yang juga pedagang padi. Karena seringnya paceklik atau gagal panen, sehingga pak Tarto sering kesulitan modal untuk nadur/menanam. Adanya ekonomi bergulir ini dirasa pak Tarto

sangatlah membantu, selain usahanya dapat berjalan lancar, dalam bunga sebagai seorang pekerja tidak tetap dalam pedapatan, maka program ini dinilainya sangat membantu.

Matrik 2

Karakteristik Informan Yang Tergabung Dalam Kelompok Ekonomi bergulir pada kelompok KSM Mesra

Nama	Usia	Alamat Rumah	Riwayat Pendidikan	Status	Jmlh anak	Pekerjaan	Lama Bekerja
Darmawanti	40 thn	Bulakan Rt 01/IV	SMP	Menikah	3 orang	Pedagang toko kelontong	2tahun
Gi Hndoyo	41 thn	Bulakan Rt 01/IV	SMA	Menikah	2orang	Pedagang bakso	2 tahun 3 bulan
Mulyani	25 thn	Bulakan Rt 01/IV	SMA	Menikah	1orang	Buruh pabrik dan pedagang bensin	2tahun buruh, dan 8 bulan sebagai pedagan bensin
Sri Kayali	36thn	Bulakan Rt 02/IV	SMP	Menikah	2 orang	Pedagang sayur mayur	4 tahun

Suwardi		Bulakan Rt 02/04		Menikah	3 orang		
			SD			Pedagang toko kelontong dan bertani	Pedagang 4 tahun, bertani 19 tahun
Sutarto	39thn	Bulakan Rt 02/IV		Menikah	3orang		
			SMA			Pedagang pari/padi dan mboro kesolo sebagai pengrajin mebel	4 tahun

Sumber data primer diolah november 2010

B. Pembahasan

1. Peran Fasilitator dalam Kegiatan Ekonomi Bergulir Melalui Proses Perencanaan

Proses perencanaan terdiri dari proses identifikasi masalah serta identifikasi strategi. Identifikasi masalah merupakan proses menganalisa masalah ekonomi yang terjadi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan Fasilitator, BKM & UPK kepada penerima manfaat, kemudian akan dibahas bersama untuk menemukan penanganan yang tepat. Setelah masalah tersebut dirumuskan dan ditentukanlah strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, tentunya disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada pada masyarakat setempat.

Dalam proses ini masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Membuat keputusan disini adalah menunjang secara tidak langsung seperangkat aktivitas tingkah laku yang lebih luas dan bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Perencanaan di RW IV Kelurahan Bulakan tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa warga masyarakat miskin, BKM, UPK, UPL, UPS, Sekretaris, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah RW IV Kelurahan Bulakan. Forum ini sepenuhnya difasilitasi oleh ketua RW IV.

Dalam hal ini tidak semua warga diundang, karena dengan kehadiran pengurus RT dan beberapa warga miskin dinilai sudah cukup mewakili, tinggal nantinya pengurus RT mensosialisasikan kepada warganya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Arie (fasilitator ekonomi) sebagai berikut : pertanyaan:

Apakah anda mengikuti rapat dalam mengidentifikasi masalah?

”Ketika membahas masalah identifikasi itu, semua dikumpulkan di aula, pertemuan yang mengadakan Pak RW dan BKM, semua juga banyak yang datang....tapi juga tidak semua ikut, hanya perwakilan dari warga miskin, sama pengurus BKM dan ada aparat desa, ada juga yang namanya faskel itu, supaya bisa efisien.....yang dikasih undangan saja....”

(Sumber : Wawancara, 23 Juni 2010)

- Identifikasi masalah

Dalam proses identifikasi masalah, masyarakat di ajak untuk berkumpul, berembug bersama mengenai permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan ekonomi bergulir. Masyarakat dilibatkan dalam forum yang telah disediakan untuk mereka. Tujuan dari adanya identifikasi masalah ini adalah agar masyarakat bisa diajak untuk berfikir bersama dan menemukan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

Peran fasilitator dalam Identifikasi masalah ini bisa dilihat dari pendampingan dan kehadiran mereka dalam forum atau pertemuan yang telah diadakan. Hal tersebut seperti yang drungkapkan oleh Ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut : pertanyaan : apakah anda sebagai senior fasilitator juga mengikuti dalam pembahasan perumusan masalah?

”Ketika pembahasan perumusan masalah saya datang dalam pertemuan tersebut. Saya malah juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saya menjelaskan tentang program ekonomi bergulir kepada warga.

(Sumber : Wawancara, 25 juni 2010)

Pernyataan ini dipertegas oleh D.A.M (fasilitator Tim 27) adalah sebagai berikut :

”Saya sebagai fasilitator memiliki kewajiban mendampingi juga ikut rapat dan mendampingi dalam setiap kegiatan lingkungan, ekonomi dan sosial meskipun kami memiliki Fasilitator terkait spesialisasi

commit to user

masing-masing, didalam pertemuan kami biasanya memberikan pendampingan secara menyeluruh dan terspesialisasi sesuai masing-masing bidang yang diampu, kalau Fasilitator Ekonomi mendampingi terutama menyangkut kegiatan ekonomi bergulir mbak....”

(Sumber : Wawancara, 25 Juni 2010)

Hal serupa juga diperjelas lagi oleh pernyataan Mas latif (fasilitator tim 27) adalah sebagai berikut :

”Saya selalu datang kalau ada rapat atau pertemuan tentang PNPM itu mbak. Soalnya saya tahu dan ingin mendampingi warga dalam rapat-rapat tentang program-program yang ditawarkan...”

(Sumber : Wawancara, 25 Juni 2010)

Dari penuturan beberapa responden diatas dapat diketahui bahwa peran fasilitator dalam kegiatan ekonomi bergulir untuk datang ke rapat atau pertemuan itu karena mereka menyadari sendiri akan arti penting rapat tersebut. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, melainkan memang karena keinginan dan kesadaran mereka sendiri tentang tanggung jawab mereka terhadap Program PNPM-MP.

Proses identifikasi masalah yang dilakukan telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- Penentuan warga yang menerima bantuan berdasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.

Setelah mengidentifikasi masalah, proses selanjutnya adalah mengidentifikasi strategi untuk pemecahan masalah. Mencari alat atau cara untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut :

”Merumuskan masalah sudah selesai, ya tinggal bentuk strateginya bagaimana biar rajin mengangsur mbak...”

(Sumber : Wawancara, 25 juni 2010)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Arie (fasilitator) sebagai berikut :

”Waktu pembentukan KSM saya ditunjuk sebagai koordinator untuk mengurus uang pinjaman dan mengkoordinir angsuran dari anggota KSM yang disetor ke UPK, yang lain jadi anggota....”

(Sumber:Wawancara, 26 Juni 2010)

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut :

”Ketika itu langsung dibentuk kelompok-kelompok gitu, terus dipilih ketua kelompoknya, bendahara dan anggota melalui renbuk antar anggota yang ada satu kelompok...”

(Sumber : Wawancara, 26 Juni 2010)

Peranan fasilitator dalam identifikasi strategi ini bisa dilihat dari sejauh mana dia ikut andil dan keaktifan memberikan sosialisasi dalam rapat atau forum pertemuan. Hal ini bisa kita lihat dari aktivitas mereka ketika rapat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh DA (fasilitator) sebagai berikut :

commit to user

”Rata-rata warga hanya menerima keputusan dan omongan pak RT, RW yang memang sudah sesuai dengan petunjuk BKM, dan UPK sebagai pengelola PNPM di kelurahan bulakan, karena mereka kan punya atasan faskel yang lebih mumpuni mbak, maka dari itu mbak saya sebagai faskel harus slalu mendampingi dalam setiap ada kegiatan.....”

(Sumber : Wawancara, 27 Juni 2010)

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Arie (fasilitator) sebagai berikut :

”Semua warga disini sama merasa bodoh sehingga kami merasa bertanggung jawab untuk ikut pertemuan dan memberikan penjelasan tentang PNPM- MP serta program-programnya. Agar manfaatnya juga terasa sangat mengena bagi masyarakat miskin jadi mbak...”

(Sumber : Wawancara, 27 Juni 2010)

Dari kedua pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa peran fasilitator didalam forum atau rapat pertemuan dalam identifikasi strategi bersifat aktif karena mekanisme sudah jelas dan mereka sangat merasakan manfaat kegiatan ekonomi bergulir bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di RW IV Kelurahan Bulakan.

C. Peran Fasilitator dalam Kegiatan Ekonomi Bergulir Melalui Proses Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pelaksanaan meliputi pembuatan dan verifikasi proposal, pencairan dana, penerimaan dana.

1. Pembuatan proposal

Pembuatan proposal dilaksanakan setelah adanya identifikasi masalah serta strategi, yang telah mendapatkan keputusan bulat yang dilaksanakan seluruh warga melalui pertemuan di tingkat RT dan RW.

Mengingat bahwa proposal merupakan syarat mutlak untuk pengajuan dana, proposal harus dibuat serapi dan sejelas mungkin. Ketidakjelasan proposal akan dikembalikan lagi untuk diperbaiki kembali.

Pembuatan proposal lebih dilakukan oleh pihak masyarakat sendiri dan didampingi oleh fasilitator. Warga penerima manfaat dana bergulir kurang mengerti akan adanya proposal serta pembuatan dan tujuannya namun tim dari Faskel, BKM dan UPK membantunya sebisa mungkin, format proposal juga telah disediakan oleh BKM dan UPK setelah itu akan diverifikasi bersama oleh UPK, BKM dan Fasilitator Ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut: pertanyaan: apakah anda juga berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir?

“Saya ikut mendampingi dan memberikan penjelasan masalah pembuatan proposal itu mbak.... saya mengajari mengisi data-data

commit to user

kelompok agar sesuai dengan kebenarannya serta mengumpulkan kartu identitas yang dibutuhkan serta ada mengetahuinya dari pak RT/RW dan BKM wilayah, dan ada perjanjiannya bermeterai, kurang lebihnya itu mbak....”

(Sumber : Wawancara, 27 Juni 2010)

Hal serupa juga dipertegas oleh Arie (fasilitator) sebagai berikut :

”Saya tidak membuatkan proposal mbak tapi mendampingi warga dan bersama-sama semua anggota kelompok di sekretariat BKM dan diajari oleh UPK nya mbak, yang belum begitu paham biasanya selalau dibantu oleh pak RT/RW diarahkan kepada UPK dan BKM serta kami sebagai fasilitator yang lebih lebih paham...”

(Sumber : Wawancara, 27 Juni 2010)

Hal serupa juga dipertegas oleh pernyataan Ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut :

”Saya slalu mengecek tentang proposal mbak, pokoknya kami biasa mengisi data-data dikertas bersama UPK, BKM di sekertariat. Agar proposal sesuai tujuan dan benar sehingga tidak ditolak...”

(Sumber : Wawancara, 27 Juni 2010)

Dari beberapa pernyataan responden diatas menyatakan bahwa rata-rata masyarakat yang penerima manfaat yang belum paham akan pembuatan proposal, selalu dibantu oleh Fasilitator, UPK, sekretaris dan BKM serta pak RT/RW yang juga ikut membantu penjelesan kegiatan ekonomi bergulir. Disini peran fasilitator sangat jelas terlihat, agar

masyarakat lebih faham dan tau akan fungsi dan manfaat proposal dalam kegiatan program tersebut.

2. Penerimaan dana

Proses ini berjalan setelah proposal diajukan ke BKM, dan telah di ACC, atau disetujui kemudian dana baru cair dan turun ke tiap kelompok peminjam masyarakat. Proses penerimaan dana dilakukan oleh BKM dan UPK serta sekretaris di Sekretariat BKM yang ada di setiap Kelurahan dimana tempat tersebut di fasilitasi oleh Kelurahan dengan mengundang seluruh perangkat desa, RT/RW, anggota KSM harus hadir sebagai saksi.

Setelah dana diserahkan kepada pengurus ditingkat RW, kemudian pengelolaan selanjutnya sudah diserahkan kepada pengurus masing-masing KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang meminjam. Dana yang telah diterima diserahkan kepada ketua kelompok untuk dibagi kepada anggotanya, kemudian dilakukan oleh ketua kelompok tersebut.

Ketua kelompok mengumpulkan seluruh anggotanya, kemudian baru dibagi sesuai dengan kesepakatan ketua kelompok tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut :

”Ketika pembagian uang bantuan, semua anggota KSM dikumpulkan bareng mbak, terus di kasih uang secara adil sesuai dengan jumlah pinjaman dan punya kewajiban untuk mengangsur sesuai kemampuan anggotanya...”

(Sumber:Wawancara, 28 Juni 2010)

Pernyataan ini di pertegas oleh DA(fasilitator) sebagai berikut :

”Ketika pencairan dana kan semua anggota KSM harus datang ke sekretariat BKM jadi pembagian uang ya dibagi sama rata setiap anggota KSM itu, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati bersama pula juga untuk kesanggupan angsurannya ... jadi juga sama tahu semua mbak...kalau begitu juga sama enak dan tidak ada yang iri mbak....”

(Sumber : Wawancara, 28 Juni 2010)

Keterlibatan fasilitator dalam penerimaan dana mulai dari pengajuan proposal sampai pada penerimaan uang . Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu SW (senior fasilitator) sebagai berikut :

”Setelah mendapatkan dana dari ketua kelompok... sebelumnya kan pengajuan proposal pinjaman dulu kalo disetujui ya kemudian uangnya bisa cair dan di bagi pada anggota kelompok peminjam. Kan sudah ada perjanjian dan syaratnya juga untuk tanggal angsurannya.... Saya juga ikut mendampingi masyarakat mbak....”

(Sumber : Wawancara, 28 juni 2010)

Hal serupa juga dipertegas oleh pernyataan yang disampaikan oleh Latief (fasilitator) sebagai berikut :

”Kalau uang pinjaman yang membagi ya ketua kelompoknya mbak, sama semua tiap anggotanya kewajiban kembali juga sama

tidak ada yang lain-lain saya hanya menyaksikan dan mendampingi dalam pembagian dana tersebut mbak....”

(Sumber : Wawancara, 28 Juni 2010)

Dari pernyataan beberapa responden diatas bisa disimpulkan bahwa peran fasilitator pada proses pengewasan penerima manfaat pada kegiatan ekonomi bergulir agar tepat sasaran sangat diperlukan demikian juga peran ketua KSM sangat menentukan kelancaran angsuran dari masing-masing KSM peminjam dana ekonomi bergulir, disinilah dibutuhkan kemampuan ketua untuk memberikan contoh angsuran tepat waktu dan koordinasi yang baik untuk kelompoknya.

3. Membayar angsuran

Proses ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kelompok peminjam sebagai penerima manfaat. Peminjam harus mengembalikan uang yang telah dipinjam dengan cara mengangsur tiap bulan secara tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh UPK. Besarnya angsuran disesuaikan dengan jumlah pinjaman, semakin banyak jumlahnya tentunya besar angsuran semakin besar. Dalam hal ini fasilitator hanya bertugas mengecek kepada BKM kelangsungan pembayaran yang dilakukan oleh anggota peminjam dana ekonomi bergulir. Dapat terlihat melalui wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

Pertanyaan : tugas apa yang anda lakukan sebagai fasilitator dalam pengembalian dana bergulir ?

Pernyataan yang disampaikan oleh Arie (fasilitator ekonomi) sebagai berikut :

”Sebagai fasilitator ya tugas kami meninjau bagaimana kelangsungan pengembalian dana tersebut dan mengecek kelompok mana yang dalam hal ini pengangsurannya agak lambat, biasanya kami juga melakukan evaluasi kepada ketua kelompok apa yang menjadi hambatan”

Hal ini juga dipertegas oleh DA (Fasilitator), sebagai berikut :

”Karena angsuran telah menjadi suatu kewajiban, masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan ekonomi bergulir telah mengerti segala bentuk konsekwensi dan akibat serta tanggung jawab yang telah dibebankan pada mereka”.

Matrik 3

Peran fasilitator Dalam Pelaksanaan Kegiatan ekonomi bergulir Pada PNPB-MP di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten

Sukoharjo berdasarkan kriteria jenis kelamin

No	Peran fasilitator	Perencanaan	Pelaksanaan	Pemanfaatan
1.	Perempuan	Peran fasilitator perempuan dalam perencanaan adalah aktif mendampingi serta memberikan penjelasan tentang	Peran fasilitator perempuan dalam pelaksanaan pada umumnya sangat aktif berperan secara langsung,	Peran fasilitator dalam pemanfaatan pada umumnya mendampingi dan memberikan

commit to user

		<p>program ekonomi bergulir sesuai prosedur yang sudah ditetapkan keputusan dari KSM ekonomi sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari warga, pengurus RT dan RW dan BKM serta UPK sebagai pengawal kegiatan karena disini masyarakat masih merasa bodoh dan masih takut untuk mengutarakan semua pendapatnya.</p>	<p>adapun peran fasilitator sebagai, orang yang diajak konsultasi oleh warga yang melakukan pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir.</p>	<p>motivasi serta sosialisasi pada masyarakat agar mendapatkan hak dan kewajiban yang sama yaitu memanfaatkan dan menjaga hasil program yang dilakukan demi kesejahteraan bersama.</p>
2.	Laki-laki	<p>Peran fasilitator yang laki-laki maupun yang perempuan dalam perencanaan pada umumnya sama semua mendampingi</p>	<p>Peran fasilitator yang laki-laki maupun yang perempuan dalam pelaksanaan pada umumnya</p>	<p>Peran fasilitator laki-laki maupun yang perempuan dalam pemanfaatan pada umumnya</p>

		<p>dan memberikan sosialisasi serta menyetujui keputusan dari KSM Lingkungan sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari warga, pengurus RT dan RW dan BKM serta UPK sebagai pengawal kegiatan karena disini perempuan merasa bodoh dan masih takut untuk mengutarakan semua pendapatnya.</p>	<p>berperan secara langsung, adapun peran fasilitator sebagai pendamping dan sebagai kontrol dalam kegiatan ekonomi bergulir.</p>	<p>tidak ada diskriminasi mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama yaitu memanfaatkan dan menjaga hasil program yang dilakukan demi kesejahteraan bersama.</p>
--	--	--	---	--

Sumber Data primer diolah juni 2010

Adapun hasil dari penerapan strategi oleh para Fasilitator yang mendampingi Kelurahan Bulakan adalah adanya peningkatan Rapement Rate dari angka 42 % menjadi 91 % selama kurang lebih 2 Tahun selain itu juga tertanam sebuah landasan pemahaman masyarakat yang kuat dan mengakar

commit to user

sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh adanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut, demikian dapat disajikan data dari kenaikan tingkat pengembalian dana bergulir :

Tabel Repement Rate Kelurahan Bulakan (dalam %)

TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010	
Januari	42	Januari	50	Januari	79
Februari	42	Februari	53	Februari	84
Maret	43	Maret	53	Maret	84
April	43	April	60	April	86
Mei	44	Mei	60	Mei	88
Juni	44	Juni	63	Juni	91
Juli	45	Juli	69	Juli	91
Agustus	45	Agustus	75	Agustus	90
September	45	September	78	September	91
Oktober	49	Oktober	78	Oktober	92
November	44	November	78	November	91
Desember	45	Desember	78	Desember	91

Sumber : Catatan Kolektibilitas Fasilitator Ekonomi Tim 25

Dari tahun 2008 sampai dengan 2010

Dari pembahasan diatas merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara demi memperoleh hasil peran fasilitator berdasar responden yaitu fasilitator itu sendiri. Berikut akan disajikan sejauh mana peran fasilitator dalam meningkatkan repement rate sebagai bahan tambahan diambil

commit to user

wawancara kepada informan guna menambah data dari hasil penelitian terkait peranan fasilitator dan akan disajikan dalam bentuk matrik.

D. Proses Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)

1. Proses Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok

Pendampingan rutin di tingkat kelompok sebagai wadah bertukar pikiran antar anggota KSM guna memecahkan permasalahan, merumuskan alternatif pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki kelompok. Dalam proses ini dilakukan :

a. Pertemuan Pengurus

Pertemuan pengurus berguna untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi, melakukan proses pembukuan, pencatatan kegiatan dan keuangan kelompok. Hal ini penting karena pengurus yang terpilih merupakan orang yang memiliki sedikit pengetahuan organisasinya dan pendidikan formal anggota adalah SD-SMA. Pendampingan ini diharapkan pengurus mengetahui dan paham akan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengurus. Selain itu mereka diharapkan kedepannya menjadi kader atau motivator ditingkat kelompok bahkan desa. Pertemuan pengurus biasanya dilakukan sebelum pertemuan kelompok guna menyiapkan laporan (keuangan maupun agenda kelompok) kepada anggota saat pertemuan. Pendampingan lebih ditekankan pada pencatatan dan penyusunan keuangan perbulan. Dipertemuan tersebut para pengurus bisa bertanya

bebas dalam membuat laporan keuangan, karena apabila ada kesalahan nantinya yang akan mendapatkan peringatan dari Fasilitator (PNPM-MP) adalah pengurus dan pendamping.

Matrik 4

Pendapat Informan Tentang Materi yang Dibahas dalam Pertemuan Pengurus

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Membahas terkait kelompok yang baik dan memilih usaha yang akan dilakukan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Kami tau, karena kami bagian pengurus kelompok.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Pemberian materi terkait organisasi yang baik, pembagian stimulant modal dan mekanisme pengembalian.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena bukan pengurus pengurus kelompok. Saya Cuma anggota, jadi tidak begitu paham.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Pertemuan hanya mengecek pembukuan keuangan (tekait buku neraca harian, neraca saldo dan simpan pinjam)
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Monitoring kegiatan kelompok dan keuangan.

commit to user

Dari matrik di atas pertemuan pengurus di Kelompok UPK (Unit Pengelola Ekonomi) secara umum membahas terkait mewujudkan suatu kelompok yang baik (melalui penguatan pengurus, administrasi dan keuangan), usaha yang baik dan cara pemasaran produk.

Pertemuan pengurus dilakukan sebelum pertemuan kelompok, walau sampai saat ini baru terlaksana beberapa kali. Ini dikarenakan, para pengurus memiliki kesibukan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan pengurus. *Pertemuan pengurus dilakukan dirumh ketua RW IV* yang membahas proses pencairan pembagian stimulant modal dan mekanisme pengembalian. Adapun hasilnya adalah tiap anggota mendapat bantuan stimulant modal sebesar Rp. 500.000,- dengan diangsur maksimal 10 kali. Akan disela-sela itu pendamping juga memberikan materi terkait bagaimana mewujudkan menjadi kelompok yang baik melalui penguatan pengurus, administrasi dan keuangan, usaha yang baik. *Pertemuan pengurus kedua*, pada tanggal maret 2010 bertempat di rumah bendahara yaitu bapak Gi Handoyo yang membahas terkait bantuan dana bergulir dimanfaatkan untuk siapa dan untuk apa?. Hal ini dilakukan pendampingan oleh fasilitator.

Matrik 5

Pendapat Informan Tentang Pertemuan Pengurus masing-masing KSM

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Pertemuan pengurus terakhir bulan maret 2010 dan selebihnya melalui handphone atau ke rumah langsung apabila membutuhkan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Ya kalau dari ketua ada rapat pembahasan ya mengikuti.terakhir 2010 lalu
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Terakhir maret 2010, dan selebihnya melalui kadang datang kerumah pengurus KSM.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Terakhir pertemuan saya lupa tanggalnya
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Hanya anggota saya, jadi tidak tau pastinya pertemuan pengurus
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Saya tidak datang waktu itu ada keperluan mendadak

Dari matrik di atas secara keorganisasian Kelompok Swadaya Masyarakat setelah pertemuan pengurus bulan maret 2010 sampai sekarang belum ada lagi pertemuan pengurus lagi, sehingga

commit to user

komunikasi pengurus secara formal kurang. Komunikasi yang dilakukan selama ini cukup melalui handphone atau pergi kerumah pengurus langsung. Akibatnya secara kepengurus Kelompok KSM dalam komunikasi kurang lancar dan sulit membuat keputusan. Terbukti untuk mengadakan pelatihan kegiatan ekonomi bergulir saja yang pengurus sebagai panitia lokalnya tidak bisa terlaksana dan tertunda-tunda. Fasilitator (PNPM-MP) yang diwakili pendamping kelompok tersebut sudah mengusulkan kepada pengurus untuk mengadakan pertemuan kembali guna mengeratkan kepengurusan KSM.

Akhirnya pada pertemuan kelompok pada tanggal 8 Juni 2010, pengurus sepakat mengadakan pertemuan pengurus kembali. Sebab perlu ada penyegaran kembali pengurus dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara formal, guna menyelesaikan permasalahan ditingkat kelompok dan rencana kedepan Kelompok Swadaya Masyarakat.

b. Pertemuan Kelompok.

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin tiap bulan, dan di kelompok Swadaya Masyarakat dilaksanakan pada setiap tanggal 8.

Matrik 6

**Pendapat Informan Tentang Kegiatan yang Dibahas dalam
Pertemuan Kelompok**

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Saya tahu karena saya ketua KSM melati RT01/IV, kami sering membahas simpan pinjam. Dan kalau ada kucurasn dana ya langsung dibagikan ke anggota, saya juga berhak mengingatkan anggota apabila ada yang mecet dalam pelunasan. Dan kadang suka bertukar pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Paling pertemuan hanya membahas simpan pinjam uang
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Membahas keuangan KSM baik simpan maupun pinjamnya. Kadang cerita-cerita usaha masing-masing.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Ya saya pernah tau, dan mengikuti pembahasannya hanya simpan pinjam dana tersebut. Sangat membantu kalau ada kesulitan dalam usaha.

commit to user

Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Ya sangat membantu, kalau-kalau ada anggota macet bayarnya saling mengingatkan, jadi terkadang saya tau dana simpan pinjam yang ada jumlahnya berapa.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Saya datang kalau gak sibuk, ya sebagian tau paling-paling membahas simpan pinjam saja yang dibahas. Dan kalau ada kesulitan teman lain membantu pemecahannya semacam cerita-cerita.

Dari matrik di atas agenda Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah simpan pinjam, bertukar pikiran bersama melalui curhat dan materi dari pendamping. Seiring perjalanan waktu pertemuan kelompok hanyalah sebagai ajang kumpul-kumpul, karena hanya berjalan simpan pinjam. Terkait agenda belajar bersama melalui cerita atau bahasa lain curhat antar anggota dan materi dari pendamping tidak ada, karena anggota kurang antusias dalam pendampingan. Akibatnya pertemuan kelompok dianggap sebagai pertemuan rutin dan bukan sebagai agenda untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai contoh terkait cara memajukan kelompok melalui usaha selain simpan pinjam, Akibatnya perkembangan yang signifikan setelah ada pendampingan dari Fasilitator (PNPM-MP) belum ada.

commit to user

2. Proses Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM

Kegiatan yang dilakukan secara merta mendadak dan acak ini memiliki manfaat, sebagai cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait stimulant modal yang diberikan kepada para KSM. Karena dari stimulant modal tersebut, apakah dipergunakan benar-benar untuk usaha atau tidak. Selain juga memiliki manfaat para anggota KSM termotivasi untuk berusaha mengubah nasibnya agar semakin baik. Kunjungan ini tidak hanya dilakukan oleh fasilitator, tetapi juga melibatkan pengurus dan anggota kelompok yang lain. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada anggota keluarga (khususnya suami atau istri) akan pentingnya kelompok KSM dan apa saja kegiatan yang dilakukan. Hal ini diwakili oleh bu Mulyani yang dipandang mampu masalah program PNPM-MP dari Kelompok Swadaya Masyarakat dan dari Fasilitator (PNPM-MP) adalah Ibu Arie selaku fasilitator ekonomi dan ibu SW selaku senior fasilitator.

Matrik 7

Pendapat Informan Tentang Sasaran yang Dikunjungi

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Anggota yang mendapatkan kunjungan dari pendamping secara mendadak.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Kurang tahu, akan tetapi kemarin telah mendapat kunjungan dari pendamping.
Anggota KSM yang meminjam	Anggota yang mendapatkan kunjungan

commit to user

ekonomi bergulir	untuk membayar angsuran.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Anggota yang mendapatkan kunjungan untuk membayar angsuran.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Anggota yang mendapatkan kunjungan dari pendamping secara mendadak.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Anggota yang mendapatkan kunjungan untuk membayar angsuran.

Dari matrik di atas kunjungan dan diskusi ke rumah KSM untuk mengangsur pinjaman dengan kriteria yang sudah menunggak angsuran pinjaman saja. Oleh karena itu, yang mendapat kunjungan beberapa anggota kelompok Swadaya Masyarakat. Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah KSM juga melakukan suatu kegiatan analisa usaha. Analisa usaha yang dilakukan oleh anggota KSM.

Matrik 8

Pendapat Informan Tentang Hasil Diskusi

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak mengikuti rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Cukup tahu, adapun hasil diskusinya dalam rapat adalah aturan untuk meminjam dana kegiatan ekonomi bergulir.

Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak mengikuti rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tahu karena mengikuti rapat tapi hanya diam dan pasif mengikuti jalanya rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tahu, adapun hasil diskusinya dalam rapat adalah mengidentifikasi masalah yaitu memilih sebuah usaha yang sesuai dengan kemampuan dan modal yang ada

Dari kunjungan yang dilakukan baik oleh pendamping dari Fasilitator (PNPM-MP), sangat efektif untuk mengetahui seberapa manfaat pendampingan dari Fasilitator (PNPM-MP) baik melalui pelatihan-pelatihan maupun bantu yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan, pendamping melakukan kunjungan ke rumah KSM hanya secara acak dan secara keseluruhan. Adapun alasan yang adalah agar maksimal sesuai dengan rencana dan tujuan awal dari pendamping, sehingga kunjungan dilakukan secara keseluruhan. Jadi dari proses kunjungan tersebut bisa mengetahui secara obyektif manfaat dari pendampingan.

E. Proses Pemberian Bantuan

a. Proses Stimulant Modal

Sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, permodalan menjadi hal penting yang dibutuhkan para anggota KSM untuk memulai usahanya. Hal ini dikarenakan akibat terbatasnya modal mereka. Selain itu permodalan sangat dibutuhkan untuk keperluan membeli bahan baku.

commit to user

Pada tahap awal desain program adalah memberikan permodalan yang lebih kecil untuk permulaan awal. Oleh karena itu, melalui diskusi didalam pertemuan kelompok KSM dan pertemuan pengurus disepakati bahwa stimulan modal yang diberikan akan dikelola dan dikembangkan oleh kelompok untuk modal usaha simpan pinjam.

Matrik9

Pendapat Informan Tentang Stimulant Modal

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Stimulant diberikan bertujuan agar para anggota KSM tidak kesulitan dalam memperoleh modal usaha lagi. Stimulant modal diberikan kepada satu kelompok sebesar : Rp. 2.500.000,- (dibagi dengan 1 kelompok KSM yang berjumlah lima orang)
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Stimulant bertujuan untuk membantu kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usahanya, jumlahnya Rp. 500.000,-perorang Stimulant modal dijadikan usaha simpan pinjam kelompok dan nantinya harus mengembalikan ke PNPM-MP.
Anggota KSM yang meminjam	Stimulant bertujuan agar anggota KSM

commit to user

ekonomi bergulir	bisa membuka peluang usaha demi kemajuan taraf hidupnya.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Stimulant modal bertujuan agar masyarakat kecukupan modal usaha.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir.	Stimulant modal bertujuan untuk membantu permodalan bagi anggota KSM.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir.	Stimulant modal bertujuan agar anggota KSM tercukupi modal usahanya. Akan tetapi para anggota KSM berkewajiban mengembalikan stimulant modal melalui kelompok kepada PNPM-MP yang tujuannya untuk keberlangsungan program selanjutnya

Dari matrik di atas realitanya setiap anggota KSM yang terlibat dalam program dan tergabung dalam anggota Kelompok Swadaya masyarakat akan mendapatkan stimulant modal sebesar Rp.500.000,- per orang, sehingga total bantuan yang diterima kelompok adalah Rp. 2.500.000,-. Proses pemberian stimulant modal tidak diberikan satu kali. Tahap pertama, pada 8 April 2009 Stimulant modal ini sesuai dengan hasil rapat dan nantinya akan harus dikembalikan kepada kelompok sebagai usaha simpan pinjam. Stimulat modal dimasukkan dalam rekening *commit to user*

kelompok dan status keuangan dilaporkan setiap bulan dalam pertemuan kelompok. Penambah modal kelompok juga dilakukan, yaitu dengan anggota KSM berinisiatif untuk menggali permodalan swadaya melalui simpanan pokok Rp 10.000,- per orang dan simpanan wajib Rp 1.000,- orang per bulan.

Diakhir program para anggota Kelompok Swadaya masyarakat ini harus mengembalikan uang stimulant sebesar 100% atau Rp. 2.500.000,- kepada PNPM-MP. Tujuannya uang tersebut untuk kelanjutan program berikutnya, dari Fasilitator (PNPM-MP) tidak akan membiarkan program yang telah berjalan berhenti. Uang pengembalian tersebut dilakukan bertahap selama beberapa kali yang diangsur lewat UPK. Uang tersebut akan dimasukkan dalam keuangan PNPM-MP untuk permodalan berikutnya kepada kelompok KSM yang tingkat pengembaliannya tergolong sukses dan tertib. Stimulant modal setelah kelompok mengembalikan sebesar 100% atau sebesar Rp. 2.500.000,-, maka stimulant modal tersebut menjadi milik kelompok. Fasilitator (PNPM-MP) akan tetap meminta laporan bulanan dari sirkulasi keuangan didalam kelompok. Tujuannya mengetahui kondisi stimulant modal yang diberikan, apakah tetap dimanfaatkan dan dikembangkan atau tidak.

Kelompok KSM dengan adanya masalah ini tidak langsung diam. Pertemuan rutin kelompok pada 8 November 2010, selain diisi dengan kegiatan membahas kegiatan program yaitu simpan pinjam, dan materi dari Fasilitator (PNPM-MP). Kelompok berinisiatif membahas Proses

pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjalankan PNPM-MP yang secara formal dilakukan oleh Fasilitator (PNPM-MP) di atas adalah melalui peningkatan sumberdaya manusia (pendampingan kelompok, kunjungan dan diskusi ke rumah KSM) dan pemberian bantuan (stimulant modal).

F. Peranan Fasilitator (PNPM-MP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Ekonomi Bergulir Di Desa Bulakan

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), “The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.” Selanjutnya Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:

pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan penguatan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien

sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994).

Fasilitator (PNPM-MP) adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang memfokuskan diri pada kegiatan tridaya dan pengembangan masyarakat. Di Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo melakukan pendampingan terhadap anggota KSM khususnya pada kegiatan ekonomi bergulir dengan membentuk Kelompok KSM. Kelompok ini merupakan kelompok kecil dari masyarakat yang tergabung dan dapat diartikan sebagai kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan terorganisasi secara sosial dan mempunyai diferensiasi peranan untuk tujuan memajukan perekonomian demi kesejahteraan yang sudah direncanakan dan dicita-citakan.

Pada sub bab ini, akan dapat dibahas tentang peranan Fasilitator (PNPM-MP) melalui Kelompok KSM dan UPK Desa Bulakan dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat pada upaya peningkatan dan memajukan bidang perekonomian. di Desa Bulakan kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

1. Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pemberdayaan

a. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas SDM para anggota KSM diharapkan dapat berperan sebagai subyek kegiatan dan dapat menindaklanjuti kegiatan awal yang sudah dirintis bersama Fasilitator (PNPM-MP).

Masyarakat sebagai penerima manfaat diharapkan dapat mengembangkan sendiri apa yang didapat dari setiap kegiatan atau pelatihan bersama Fasilitator (PNPM-MP).

b. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok

Kegiatan pendampingan di tingkat kelompok yang dilakukan Fasilitator (PNPM-MP) merupakan upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) Kelompok KSM, sehingga menjadi suatu wadah yang berusaha menggerakkan para anggota KSM yang tergabung didalamnya bisa menjadi contoh bagi para anggota KSM lain yang belum tergabung. Pendampingan rutin di tingkat kelompok terbagi dalam dua kegiatan yaitu pendampingan pertemuan pengurus dan pertemuan kelompok.

Matrik 10

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pendampingan Pertemuan Pengurus

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir.	Memberikan masukan terkait dalam memajukan kelompok yang baik, seperti dalam membuat laporan keuangan dan kegiatan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak mengikuti rapat.

commit to user

Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan masukan terkait dalam memajukan kelompok yang baik, seperti dalam membuat laporan keuangan dan kegiatan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak ikut rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan masukan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan masukan.

Dari matrik di atas menunjukkan peranan Fasilitator (PNPM-MP) dalam melakukan pendampingan rutin di tingkat kelompok memiliki suatu hak-hak. Adapun hak tersebut adalah memberikan masukan terkait bagaimana memajukan kelompoknya, baik dalam membuat laporan keuangan, kegiatan dan menggerakkan anggota untuk mengangsur pinjaman dandan tertib dan disiplin.

Matrik11

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pendampingan Pertemuan Kelompok

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan usulan kepada anggota guna kemajuan KSM.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Mengatur jalannya acara.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan masukan kepada para anggota KSM
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan masukan kepada anggota apabila dirasa perlu.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan masukan supaya anggota KSM bersemangat dalam bekerja.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Meminta laporan keuangan dan kegiatan kelompok.

Dari matrik di atas hak Fasilitator (PNPM-MP) yang sangat banyak agar bisa memajukan usaha anggota KSM. Adapun hak tersebut adalah Fasilitator (PNPM-MP) bisa mengatur jalannya acara, memberikan usulan kepada anggota terkait bagaimana mengelola sebuah usaha yang baik dan meminta laporan keuangan dan kegiatan kelompok.

c. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Anggota KSM

Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah anggota KSM yang dilakukan Fasilitator (PNPM-MP) pada masyarakat tujuannya agar semua yang menjadi pemikiran atau ganjalan didalam anggota kelompok KSM dan malu untuk disampaikan di pertemuan kelompok.

Matrik 12

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	mengetahui, karena sudah pernah dikunjungi.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberi masukan dengan melakukan analisa usaha bersama
Anggota KSM yang	Tidak mengetahui, karena belum

commit to user

meminjam ekonomi bergulir		pernah dikunjungi.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir		Tidak mengetahui, karena belum pernah dikunjungi.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir		Tidak mengetahui, karena belum pernah dikunjungi.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir		Memberikan masukan terkait bagaimana memajukan usahanya.

Dari matrik di atas terlihat dari kegiatan kunjungan kurang diketahui oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat. Adapun besarnya 66% atau 4 informan dari 6 informan yang diminta informasi, sehingga pendapatnya terkait hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah adalah mereka menjawab tidak mengetahui kegiatan tersebut dan alasannya belum pernah mendapat kunjungan. Dari yang mendapatkan kunjungan dan diskusi ke rumah anggota KSM oleh Fasilitator (PNPM-MP) mengutarakan, bahwa hak Fasilitator (PNPM-MP) adalah memberikan masukan terkait bagaimana memajukan usaha para anggota KSM.

2. Pemberian Bantuan

a. Stimulant Modal

Dalam menjalankan program tridaya khususnya kegiatan ekonomi bergulir yang dilakukan di desa Bulakan adalah sebagai usaha yang bersifat kecil pada umumnya. Usaha ini biasanya terbentur pada kesulitan permodalan dalam menjaga kelangsungan. Fasilitator (PNPM-MP) dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi bergulir yang di lakukan Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo juga mengalami hal yang sama, sesuai survey dan diskusi dilakukan dengan anggota KSM maupun pihak yang ada. Dari hasil survey tersebut Fasilitator (PNPM-MP) sebagai pelaku pemberdayaan memberikan stimulant modal guna membantu kesulitan modal usaha para masyarakat pelaku kegiatan Ekonomi Bergulir yaitu KSM dan UPK yang diwujudkan dalam bentuk simpan pinjam kelompok. Kemudian dari pemberian stimulant modal tersebut pastilah Fasilitator (PNPM-MP) memiliki suatu hak guna memonitoring dan mengevaluasi seberapa jauh manfaat dari program itu.

Matrik 13**Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam
Stimulant Modal**

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Mengatur terkait bagaimana pembukuannya yang benar.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Meminta laporan keuangan tiap bulan dan ikut dalam membuat aturan angsuran.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	1.Mengatur besarnya uang yang diberikan dan sekaligus caranya 2.Memberikan perintah kepada UPK atau kelompok dengan mengembalikan stimulant modal sebanyak 100% dan juga meminta laporan keuangan tiap bulannya.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Meminta laporan keuangan, dan ikut dalam membuat peraturan angsuran.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Meminta laporan keuangan bulanan kelompok.

commit to user

Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Meminta laporan bulanan dari kelompok yang berupa laporan keuangan.
--	---

Dari matrik di atas terlihat pendapat informan terkait pemberian stimulant modal tersebut, Fasilitator (PNPM-MP) memiliki beberapa hak untuk mengetahui seberapa jauh manfaat dari program itu. Adapun hak dari Fasilitator (PNPM-MP) adalah bisa meminta laporan keuangan kelompok terkait penggunaan stimulant modal. Akan tetapi sebelumnya Fasilitator (PNPM-MP) juga memiliki hak mengatur besarnya stimulant modal yang diterima oleh anggota KSM, memerintah pengembalian stimulant modal sebesar 100% dan mengatur terkait angsuran pembukuan keuangan yang baik dan benar, sehingga nantinya memudahkan Fasilitator (PNPM-MP) dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pemberdayaan

a. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok

Kegiatan pendampingan rutin ditingkat kelompok dalam pemberdayaan masyarakat kepada anggota KSM di Desa Bulakan oleh Fasilitator (PNPM-MP) selain memiliki suatu hak yang dituntunya, maka juga memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dijalankan. Harapannya Fasilitator (PNPM-MP) bisa mewujudkan tujuan dari pemberdayaan yang dimaksud, sehingga

commit to user

dalam pendampingan rutin ditingkat kelompok terbagi menjadi dua kegiatan yaitu pendampingan pertemuan pengurus dan pertemuan kelompok.

Matrik 14

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pendampingan Pertemuan Pengurus

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan materi dalam setiap pertemuan pengurus.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak mengikuti jalanya rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan materi dalam setiap pertemuan pengurus.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak mengikuti jalanya rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan materi dalam setiap pertemuan pengurus.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan materi dalam setiap pertemuan pengurus.

Dari matrik di atas menunjukkan bahwa Fasilitator (PNPM-MP) memiliki suatu kewajiban yang dilakukan dalam pendampingan pertemuan pengurus. Adapun kewajiban dari Fasilitator (PNPM-MP) adalah memberikan materi dalam setiap pertemuan pengurus.

commit to user

Matrik15

**Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM-MP)
dalam Pendampingan Pertemuan Kelompok**

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Sebagai narasumber dan memberikan materi setiap pertemuan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Sebagai narasumber dan memberikan materi setiap pertemuan.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Sebagai narasumber dan memberikan materi setiap pertemuan
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Sebagai narasumber dan memberikan materi setiap pertemuan
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memberikan materi.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Sebagai narasumber dan memberikan materi setiap pertemuan

Dari matrik di atas bahwa kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok. Akan tetapi secara umum kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok hampir sama dengan pendampingan pertemuan pengurus. Adapun kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok adalah sebagai narasumber untuk memberikan materi dan memberikan solusi dalam setiap ada permasalahan.

b. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM

Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah KSM dan UPK oleh Fasilitator (PNPM-MP) sebagai suatu solusi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi anggota KSM dan monitoring manfaat pemberian bantuan. Kegiatan tersebut pastilah Fasilitator (PNPM-MP) memiliki suatu kewajiban yang harus dilakukan, tujuannya agar antara anggota KSM dan pendamping saling memahami terkait usaha tentang ekonomi bergulir

Matrik 16

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM-MP)

dalam Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Melakukan analisa usaha bersama-sama.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Melakukan analisa usaha bersama-sama.

commit to user

Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Melakukan analisa usaha bersama-sama.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Melakukan analisa usaha bersama-sama.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Tidak tahu, karena tidak mengikuti rapat.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Melakukan analisa usaha bersama-sama.

Dari matrik di atas terlihat bahwa kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) hanyalah melakukan analisa usaha bersama-sama dengan kelompok KSM, sehingga kelompok KSM dan pendampingan mengetahui prospek usaha mereka. Karena tujuan dari kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah anggota KSM adalah agar semua yang menjadi pemikiran atau ganjalan didalam anggota kelompok anggota KSM dan malu untuk disampaikan di pertemuan kelompok dapat disampaikan waktu Fasilitator (PNPM-MP) mengunjungi ke rumahnya.

c. Pemberian Bantuan

1) Stimulant Modal

Pemberian bantuan stimulant modal kepada para anggota KSM merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Fasilitator (PNPM-MP) dalam usaha memajukan dibidang perekonomian di Desa bulakan. Kaitannya dalam hal ini

commit to user

Fasilitator (PNPM-MP) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan tersebut memiliki suatu kewajiban. tersebut bertujuan agar stimulant modal bisa dilihat ada manfaatnya atau tidak.

Matrik 17

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam Stimulant Modal

Status Informan	Tanggapan atau Pendapat
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memonitoring dan mengevaluasi laporan keuangan kelompok setiap bulannya.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	mengetahui kewajibannya yaitu mengangsur pinjaman.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dari hasil laporan keuangan kelompok.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	mengetahui kewajibannya yaitu mengangsur pinjaman.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memonitoring dan mengevaluasi pemberian stimulant modal melalui laporan keuangan bulanan kelompok.
Anggota KSM yang meminjam ekonomi bergulir	Memonitoring dan mengevaluasi dengan laporan bulan dari kelompok yang berupa laporan keuangan kelompok.

Dari matrik di atas terlihat bahwa kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pemberian bantuan stimulant modal tersebut adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait sejauh mana manfaat dari program tersebut melalui laporan keuangan kelompok. Hal ini guna mengecek bagaimana perkembangan stimulant yang diberikan, serta guna mengetahui rasa tanggungjawab dari pengurus dan anggota melalui laporan keuangan yang dibuatnya.

G. Analisis Data

Pengertian PNPM Mandiri

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dan

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan Umum

- a. Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar pendekatan, dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

1. Strategi Dasar

- a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2. Strategi operasional

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- b. Memperkuat peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;

- c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
 - d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
 - e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat daam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
 - f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.
3. PNPM—Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut mi:
- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
 - b. Otonomi. Dalam peaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
 - c. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahah dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
 - d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

- d. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- e. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- f. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- g. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- h. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- i. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan

masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- k. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

4. Pendekatan PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat pada lampiran.

PNPM-MP mengartikan pemberdayaan masyarakat dalam suatu rangkaian kegiatan integral berdasarkan tridaya yaitu mencakup daya ekonomi, daya social, dan daya lingkungan. Model tridaya merupakan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan melalui pembangunan kebersamaan, menjauhi ketergantungan pada kekuasaan structural dan bersifat lestari.

Dalam hal ini setelah beberapa waktu melakukan penelitian bagaimana dengan peranan fasilitator dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap program yang diadakan oleh PNPM-MP yaitu dan bergulir pada bidang ekonomi. Fasilitator berperan sebagai pendamping yang aktif terlihat dari kehadiran dalam berbagai pertemuan seperti dalam hal proses perencanaan terdiri dari proses identifikasi masalah serta identifikasi strategi. Dalam proses ini masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Membuat keputusan disini adalah menunjang secara tidak langsung seperangkat aktivitas tingkah laku yang lebih luas dan bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Peran fasilitator dalam Identifikasi masalah ini bisa dilihat dari *pendampingan dan kehadiran* mereka dalam forum atau pertemuan yang telah diadakan.

Setelah mengidentifikasi masalah, proses selanjutnya adalah mengidentifikasi strategi untuk pemecahan masalah. Mencari alat atau cara untuk memecahkan masalah tersebut Pernyataan ini juga dipertegas oleh Arie (fasilitator) sebagai berikut :

commit to user

”Semua warga disini sama merasa bodoh sehingga kami merasa bertanggung jawab untuk ikut pertemuan dan memberikan penjelasan tentang PNPM-MP serta program-programnya. Agar manfaatnya juga terasa sangat mengena bagi masyarakat miskin jadi mbak...”. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan sekali peran fasilitator karena dalam mengidentifikasi masalah masyarakat umumnya belum mengetahui akan hal apa yang mereka bahas oleh karena itu diperlukan sekali peran fasilitator.

Rangkaian kegiatan pelaksanaan meliputi pembuatan dan verifikasi proposal, pencairan dana, penerimaan dana.

1) Pembuatan proposal

Pembuatan proposal dilaksanakan setelah adanya identifikasi masalah serta strategi, yang telah mendapatkan keputusan bulat yang dilaksanakan seluruh warga melalui pertemuan di tingkat RT dan RW. Peranan fasilitator terlihat pada upaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping dalam jalannya acara pembuatan proposal, karena masyarakat membutuhkan pendampingan ekstra dilihat dari latar belakang masyarakat dalam pendidikan yang merasa tidak mampu apabila membuat proposal tidak didampingi oleh fasilitator.

2) Penerimaan dana

Proses ini berjalan setelah proposal diajukan ke BKM, dan telah di ACC, atau disetujui kemudian dana baru cair dan turun ke tiap kelompok peminjam masyarakat. Proses penerimaan dana dilakukan

oleh BKM dan UPK serta sekretaris di Sekretariat BKM yang ada di setiap Kelurahan dimana tempat tersebut difasilitasi oleh Kelurahan dengan mengundang seluruh perangkat desa, RT/RW, anggota KSM harus hadir sebagai saksi. Dana yang diperoleh berdasarkan verifikasi kriteria penerima manfaat dana bergulir, peng ACC an dana tersebut diketahui oleh fasilitator PNPM-MP bahkan saat penyerahan dana tersebut dilakukan oleh fasilitator. Dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator pada proses *pengawasan* penerima manfaat pada kegiatan ekonomi bergulir agar tepat sasaran sangat diperlukan demikian juga peran ketua KSM sangat menentukan kelancaran angsuran dari masing-masing KSM peminjam dana ekonomi bergulir, disini dibutuhkan kemampuan ketua untuk memberikan contoh angsuran tepat waktu dan koordinasi yang baik untuk kelompoknya. "Sebagai fasilitator ya tugas kami meninjau bagaimana kelangsungan pengembalian dana tersebut dan mengecek kelompok mana yang dalam hal ini pengangsurannya agak lambat, biasanya kami juga melakukan evaluasi kepada ketua kelompok apa yang menjadi hambatan". (pernyataan dari salah seorang fasilitator).

Proses Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) (KSM) adalah simpan pinjam, bertukar pikiran bersama melalui *curhat dan materi dari pendamping fasilitator*. Proses Kunjungan dan Diskusi ke Rumah KSM.

Kegiatan yang dilakukan secara merta mendadak dan acak ini memiliki manfaat, sebagai cara untuk melakukan *monitoring dan evaluasi* terkait stimulant modal yang diberikan kepada para KSM. Karena dari stimulant modal tersebut, apakah dipergunakan benar-benar untuk usaha atau tidak. Selain juga memiliki manfaat para anggota KSM termotivasi untuk berusaha mengubah nasibnya agar semakin baik. Kunjungan ini tidak hanya dilakukan oleh pendamping, tetapi juga melibatkan pengurus dan anggota kelompok yang lain.

Hak Fasilitator (PNPM-MP) dalam Pemberdayaan

- d. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)
- e. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok
- f. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Anggota KSM

Dari matrik di atas bahwa kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok. Akan tetapi secara umum kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok hampir sama dengan pendampingan pertemuan pengurus. Adapun kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok adalah sebagai narasumber untuk memberikan materi dan memberikan solusi dalam setiap ada permasalahan.

Dari matrik di atas bahwa kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok. Akan tetapi secara umum kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok hampir sama dengan pendampingan pertemuan pengurus.

Adapun kewajiban Fasilitator (PNPM-MP) dalam pendampingan pertemuan kelompok adalah sebagai narasumber *untuk memberikan materi dan memberikan solusi dalam setiap ada permasalahan.*

Dari hal diatas terkait peranan fasilitator dalam pemberdayaan guna upaya meningkatkan repement rate pada PNPM-MP didesa bulakan kab.sukoharjo berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa waktu lalu jika dianalisis dengan teori yang ada maka dapat ditarik hal sebagai berikut:

Secara konseptual, dalam penelitian ini didasarakn atas teori pemberdayaan. Yang secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melaikan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;

- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto,1997:210-224).

Kelompok lemah dan ketidakberdayaan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misal ditindas oleh struktur social yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender ataupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing .
- c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas social ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para

penyangang cacat. Adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai deviant (penyimpangan). Mereka sering kali dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka sering akibat dari adanya kurang adilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Dalam hal ini pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah eksploitas kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Jika dikaitkan antara teori pemberdayaan dan peranan fasilitator sejauh ini memang tidak lepas dari pemberdayaan yang dimana dalam tugasnya sebagai fasilitator PNPM-MP tugas yang dijalani oleh fasilitator. Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang dilakukan oleh fasilitator PNPM-MP dalam memberdayakan masyarakat sesuai teori pemberdayaan dan implementasi dan tindakan sosial yang dirnaksudkan Weber, yang bersifat subyektif serta mungkin terjadi karena pengaruh positif dan suatu situasi tertentu.

Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) oleh Fasilitator PNPM-MP melalui pendampingan di tingkat kelompok terbagi dua,

commit to user

yaitu pendampingan dipertemuan pengurus dan pendampingan dipertemuan kelompok. Pertemuan pengurus yang dilakukan sebelum pertemuan kelompok sangat berhubungan erat, karena dipertemuan pengurus sebagai tempat untuk membahas cara mewujudkan kelompok yang baik. Fasilitator PNPM-MP disitulah memainkan peranan nyata yang bersifat subyektif dengan mempengaruhi pengurus dalam membuat aturan dalam organisasi dan nantinya hasil rapat tersebut diutarakan dalam pertemuan kelompok. Selai tugas fasilitator PNPM-MP juga melakukan kunjungan dan diskusi ke rumah KSM guna melakukan peranan nyata yang bersifat subyektif dengan memberikan masukan terkait usaha maupun analisa usaha bersama. sehingga para anggota yang para anggota bias aterbawa alur yang dibawakan oleh fasilitator PNPM-MP.

Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) melalui pelatihan—pelatihan merupakan bagian dan tindakan subyektif Fasititor dalam upaya melestarikan dan rnemajukan melakukan pelatihan management organisasi merupakan cara Fasil italor dalam mengarahkan anggota kelompok l agar sesuai dengan pemikiran atau harapannya untuk membentuk kelompok yang baik, seperti terkait dalam membuatstruktur organisasi. Syarat-syarat menjadi pengurus maupun anggota. aturan-aturan organisasi dan lain-lain. Tindakan subyektif dari Fasilitator untuk meningkatkan

repepent rate adalah monitoring ke KSM. Peranan yang dimainkan dengan melakukan monitoring anggota KSM mampu mendorong anggota untuk sadar dengan melakukan penegmbakian repepent rate dengan baik dan lancar.

Dan tindakan subyektif di atas Fasilitator melanjutkan peranannya dengan memberikan bantuan sebagai tahap selanjutnya.

Peranan Fasilitator kepada masyarakat khusu RWIV RT01 dan RT 02 di desa bulakan selarna ini telah mengubah kehidupan masyarakat baik dari segi pengetahuan, sikap dan tindakan. Adapun wujud dari perubahan itu dilihat dari skala grafik kenaikan RR dari bulan ke bulan dan dilihat dari dara responden yang sebgaiian telah membuka peluang usaha secara mandiri hal ini sangat membawa dampak yang luar biasa. Merubah pemahaman masyarakat yang dianggap bahwa dana bergulir merupakan uang pemerintah bisa dirunah secara total dengan cara pandang masyarakat penerima manfaat dana bergulir bahwa uang yang ada harus dikembalikan demi kebaikan perputaran modal bagi masyarakat lain yang memang belum dapat merasakan dana bergulir, ketelatenan dan usaha dari fasilitator mampu diacungkan jempol karena membuka pikiran masyarakat sangatlah sulit. Dengan adanya hal ini maka dapat dilihat bagi semua bahwa usaha pemberdayaan merupakan kunci sukses guna memberantas kemiskinan secara bertahap.

Matrik

Hasil Temuan

Aspek	Keterangan Temuan
<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program - Identifikasi masalah - Pelaksanaan pembuatan proposal - Penerimaan dana - Proses membayar angsuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dan pengarahan fasilitator dan pembahasan serta membuat keputusan - Pendampingan dalam pertemuan serta menentukan strategi pemecahan masalah - Penjelasan dan mendampingi pembuatan proposal - Meng acc proposal, pencairan dana dan pendampingan, serta peninjauan/menyaksikan jalannya pembagian dana (pengawasan). - Meninjau dan mengingatkan serta mendatangi anggota KSM, menanyakan masalah yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya akan diungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan selama ini.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang bagaimanakah peran fasilitator dalam meningkatkan repement rate (tingkat pengembalian) terhadap kegiatan ekonomi bergulir di Kelurahan Bulakan dalam pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang dilihat dari sisi pemberdayaan dan ditunjang dengan menggunakan teori pemberdayaan. Anggapan yang keliru tentang program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan terutama dalam kegiatan ekonomi bergulir.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang Peranan Fasilitator (PNPM-MP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi bergulir di Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya peningkatan dan memajukan perekonomian dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator (PNPM-MP) sebagai Lembaga atau program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan, yang peduli dengan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses

sumberdaya setempat sebaik mungkin. Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Fasilitator (PNPM-MP) membentuk suatu wadah para pelaku kegiatan ekonomi bergulir menjadi beberapa kelompok. Pengurus dari Kelompok ini terdiri dari masyarakat sekitar yang pekerjaannya sebagai wiraswasta seperti pedagang dan lainnya.

Adapun peranan Fasilitator (PNPM-MP) dalam Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan khususnya dalam kegiatan ekonomi bergulir di Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)
 - a. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok

Peranan pendampingan rutin di tingkat kelompok merupakan kegiatan asistensi yang dilakukan Fasilitator (PNPM-MP) guna mewujudkan kelompok yang baik dengan pendampingan dipertemuan pengurus dan kelompok. Tujuannya ingin memfungsikan kelompok sebagai wadah bertukar pikiran dan permasalahan maupun merumuskan alternatif pemecahannya berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki kelompok. Pendampingan ini kurang efektif, karena kurang adanya kerjasama dari anggota dan pengurus.

- b. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Ketua kelompok

Peranan Fasilitator (PNPM-MP) dalam kunjungan dan diskusi ke rumah ketua kelompok adalah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dari serangkaian kegiatan pelatihan dan program yang telah

dijalankan. Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping kelompok yang dilakukan secara serta merta mendadak dan tidak terjadwal, utamanya bagi para pelaku program ekonomi bergulir yang telah berusaha beralih usaha. Masyarakat desa Bulakan dari kegiatan ini diajak melakukan analisa usaha, sehingga masyarakat Bulakan paham dan tahu usaha yang paling menguntungkan. Akan tetapi dari kegiatan ini tidak bisa dijadikan generalisasi terkait kondisi anggota kelompok ekonomi bergulir, karena yang mendapatkan kunjungan hanya dua orang saja.

2. Pemberian Bantuan

a. Stimulant Modal

Peranan Fasilitator (PNPM-MP) dalam pemberian stimulant modal bertujuan untuk permodalan masyarakat dalam masalah modal usaha, seperti pembelian bahan baku dan perbaikan peralatan. Pemberian stimulant modal ternyata tidak sesuai dengan harapan dari Fasilitator (PNPM-MP), karena banyak masyarakat Bulakan yang memakainya untuk keperluan selain usaha sesuai dengan program, seperti keperluan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan pokok, biaya sekolah, sosial dan sebagainya). Maka dari sisi manfaat pemberian stimulant kurang bermanfaat, karena masih sedikit para pelaku kegiatan ekonomi bergulir yang menjalankan program sesuai tujuan awal.

B. Implikasi

1. Implikasi Empiris

Fasilitator (PNPM-MP) diharapkan mempunyai pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Akan tetapi penelitian ini dalam melihat peranan Fasilitator (PNPM-MP) hanya terfokus pada pelaku yang tergabung dalam Kelompok kegiatan ekonomi bergulir, sedangkan masyarakat yang tidak tergabung dalam tidak diperhatikan. Adanya hal itu kemungkinan fakta-fakta terkait peranan Fasilitator (PNPM-MP) ada yang terlewatkan atau tidak terpotret oleh peneliti.

2. Implikasi Teoritis

Tindakan sosial yang dimaksudkan dapat berupa tindakan nyata-nyata diarahkan kepada orang lain juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari suatu situasi tertentu. Sebab tindakan dalam pemberdayaan masyarakat pada upaya peningkatan taraf ekonomi di Desa Bulakan ini berupa pendampingan, pelatihan dan pemberian bantuan.

Akan tetapi Teori Tindakan Sosial yang dipakai dalam penelitian ini kurang bisa mengungkap secara keseluruhan, sehingga apabila ada peneliti meneliti dengan tema yang sama dapat menggunakan Teori pemberdayaan dengan harapan bisa mengungkap terkait peranan Fasilitator (PNPM-MP). Ini karena, Teori pemberdayaan lebih menekankan pada ide tentang manusia sebagai aktor dan kreatif dari

raealitas sosialnya, sehingga bisa melihat tindakan dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan dan memajukannya dalam bidang ekonomi oleh Fasilitator (PNPM-MP) sesuai dengan realitas sosial dan keseluruhan.

Selain itu juga bisa ditambahkan dengan menggunakan Teori Perubahan Sosial guna melihat perubahan yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan oleh Fasilitator (PNPM-MP). Harapannya peneliti dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok terkait pola pikir dan perilaku, sehingga dari segi pengetahuan, keahlian dan tindakan masyarakat dapat dilihat secara mendalam dan jelas.

3. Metode

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat Peranan Fasilitator (PNPM-MP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini pengambilan sampelnya menggunakan *maximum variation sampling*, yaitu pengambilan Informan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian pemilihan Informan diambil secara *purposive sampling*, karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data. Peneliti menggunakan teknik tersebut, dirasa cukup efektif, sehingga peneliti dapat menemukan Informan yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini

adalah anggota dan pengurus Kelompok kegiatan ekonomi bergulir, serta sebagai *cross cek* data adalah dari Fasilitator (PNPM-MP) dan Pemerintah Desa Bulakan. Akan tetapi apabila peneliti ingin mengenal keseluruhan anggota dari Kelompok ekonomi bergulir dan memperoleh data secara mendalam, maka peneliti dalam menggumpulkan data menggunakan metode sensus. Adapun keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang pelestarian dan memajukan usaha kecil, khususnya pedagang kecil.
- b. Kurang mengenalnya peneliti dengan anggota Kelompok ekonomi bergulir yang terdiri dari beberapa anggota dan tersebar disebanyak RT dan RW di Desa Bulakan, karena penelitian ini hanya menggunakan 6 informan.

Secara metode hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi dan hanya berlaku pada lokasi penelitian. Akan tetapi hasil penelitian yang ada diharapkan mampu mengungkap realitas secara lebih mendalam dan obyektif, sehingga memungkinkan dapat memberikan gambaran terkait realitas yang ada.

C. Saran

Penulisan hasil penelitian ini bukan berarti tidak terdapat perbaikan-perbaikan. Ini dikarenakan, penelitian dengan tema yang serupa dapat dilakukan dengan lebih baik atau sempurna oleh peneliti lain di waktu mendatang.

Selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Internal Fasilitator (PNPM-MP)
 - a. Adanya anggapan bahwa Fasilitator (PNPM-MP) hanya merupakan orang-orang atau pendamping yang didalamnya tidak *live in*. Tujuannya untuk meningkatkan rasa empati terhadap kehidupan masyarakat yang setempat dan mempertajam kemampuan analisa sosial. Hal ini bisa menjadikan catatan bagi pendamping dalam melakukan suatu program, karena apabila tidak program tersebut akan berjalan tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Kunci dan strateginya pendamping diwajibkan *live in*, sehingga program yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan tujuan atau harapan organisasi dapat diperbaiki dan masyarakat setelah tidak didampingi bisa berdaya.
 - b. Adanya hubungan dengan Pemerintah Desa yang dinilai belum baik, meskipun dari pihak Pemerintah Desa telah mau berkerjasama disetiap kegiatan dengan meminjamkan tempat dan menghadiri acara. Akan tetapi hubungan ini dapat ditingkatkan dengan membuka komunikasi yang baik lagi, sehingga terkait dana pengembangan usaha kecil.

- c. Fasilitator (PNPM-MP) diharapkan dalam melakukan kebijakan terkait pendampingan melakukan pertimbangan yang mendalam, sehingga manifestasi dari kegiatan pemberian bantuan yang kurang tepat dapat dihindari lagi. Akibatnya kepercayaan *funding* maupun pihak-pihak yang mengawasi merasa puas dan yakin dengan keberadaan Fasilitator (PNPM-MP) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bulakan Sukoharjo.
- d. Fasilitator (PNPM-MP) diharapkan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak yang ada, seperti dengan kelompok ekonomi bergulir, Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya guna membuat pemecahan permasalahan terkait peningkatan dan memajukan perekonomian masyarakat.
- e. Perlu dilakukan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan semua unsur fasilitator dalam satu tim baik agar terjadi kesepahaman strategi secara langsung yang mendampingi di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo khususnya RW IV.
- f. Perlu adanya peningkatan pelatihan bagi pengurus ataupun anggota (BKM, UPK, UPL, UPS dan Sekretaris) agar lebih paham dan mengerti tentang kegiatan ekonomi bergulir yang sesungguhnya dan jelas.
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendampingan fasilitator melalui pendampingan yang dilakukan kepada organisasi setempat semisal LSM, PKK, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Keanggotaan yang ada.

2. Bagi Masyarakat dan kelompok ekonomi bergulir
 - a. Hendaknya terjalin hubungan yang harmonis antara anggota kelompok dan pengurus yang tergabung dalam Kelompok ekonomi bergulir sebagai salah satu elemen masyarakat di Desa Bulkan. Harapannya kondisi yang harmonis dan saling mendukung dalam upaya peningkatan dan memajukan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar. Jika hubungan ini telah tercipta suasana saling mendukung.

